SENSUS PENDUDUK 2010

1-31 MEI 2010

KEBENARAN JAWABAN ANDA MEMBANTU KEBERHASILAN PEMBANGUNAN BANGSA

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara
Jl. Asrama Nomor 179 Medan 20123
Telepon (061) 8452343, 8459966; Faksimili (061) 8452773
E-mail bps sumut1200@mailhost.bps.go.id;
Homepage: http://sumut.bps.go.id

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT TAHUN 2008

http://sumut.bps.go.id

SENSUS PENDUDUK 2010

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT TAHUN 2008 DAN ANALISIS DATA PENGANGGURAN SEMESTER I TAHUN 2009 PROVINSI SUMATERA UTARA

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA UTARA

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT TAHUN 2009 DAN ANALISIS DATA PENGANGGURAN SEMESTER I TAHUN 2009 PROVINSI SUMATERA UTARA

Katalog BPS : 3101013.12

Ukuran Buku : 27,94 cm x 21,59 cm
Jumlah Halaman : vi + 71

Naskah :

Bidang Statistik Sosial
Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Tim Penyusun Naskah :

- Penanggungjawab : Drs. Alimuddin Sidabalok, MBA.
- Editor Penanggungjawab : Ir. Sukardi, MSi.
- Koordinator : Dadan Supriadi
- Anggota : Ir. Rudi Harlon Harianja
  Reny Ari Novianti, Kurnia

Gambar & Kulit :

Bidang Statistik Sosial
Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

http://sumut.bps.go.id

Sumber Dana :
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara T.A. 2009

Diterbitkan Oleh :
Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara
Jalan Asrama No.179 Medan Telp. (061) 8452343 (Hunting), (061) 8459966
Fax. (061) 8452773
Medan – 20123

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara telah dapat menyelesaikan penyusunan Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Tahun 2008 dan Analisis Data Pengangguran Semester I Tahun 2009 di Sumatera Utara.

Dalam publikasi ini disajikan indikator-indikator yang menggambarkan kondisi kesejahteraan rakyat yang mencakup aspek kependudukan, pendidikan, kesehatan, pola konsumsi, kemiskinan, pembangunan manusia, ketenagakerjaan, dan perumahan serta memaparkan kondisi pengangguran semester I tahun 2009.

Saya mengharapkan publikasi ini mampu memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai seluruh aspek kesejahteraan rakyat di Provinsi Sumatera Utara sehingga ini dapat menjadi dasar dan acuan untuk menentukan arah kebijakan serta sebagai alat penilaian dan pemantauan terhadap pencapaian program pembangunan yang telah dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah menyumbangkan tenaga dan pemikirannya sehingga publikasi ini dapat terwujud. Akhirnya semua kritik dan saran, sangat kami hargai untuk perbaikan publikasi ini di masa yang akan datang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua dan meridhoi usaha-usaha ini, sehingga memberikan manfaat bagi bangsa dan negara.

http://sumut.bps.go.id

Medan, November 2009
BPS Provinsi Sumatera Utara
Kepala,

Drs. Alimuddin Sidabalok, MBA.
NIP 19520404 197306 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR vi

I. PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Maksud dan Tujuan 2
1.3. Sumber Data 2
1.4. Sistematika Penyajian

II. PENJELASAN TEKNIS **3**
2.1. Kependudukan 3
2.2. Pendidikan 4
2.3. Kesehatan 5
2.4. Ketenagakerjaan 5
2.5. Perumahan 6
2.6. Pengeluaran Rumahtangga 6

III. KEPENDUDUKAN **10**
3.1. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk 10
3.2. Struktur Umur dan Angka Beban Ketergantungan 13
3.3. Rasio Jenis Kelamin *(Sex Ratio)* 15
3.4. Kepadatan Penduduk 18

IV. PENDIDIKAN **22**
4.1. Angka Partisipasi Sekolah 22
4.2. Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan 23
4.3. Angka Buta Huruf 24

V. KESEHATAN **27**
5.1. Angka Kesakitan *(Morbidity Rate)* 29
5.2. Penolong Kelahiran 29
5.5. Angka Kematian Bayi *(Infant Mortality Rate)* 30
5.4. Angka Harapan Hidup 31

VI. FERTILITAS DAN KELUARGA BERENCANA **33**
6.1. Usia Perkawinan Pertama 33
6.2. Angka Kelahiran Total *(Total Fertility Rate)* 38
6.3. Keluarga Berencana 38

http://sumut.bps.go.id

Halaman

VII. KEMISKINAN, POLA KONSUMSI DAN IPM **40**
7.1. Kemiskinan 40
7.2. Pola Konsumsi 41
7.2.1. Pengeluaran Rata-rata per Kapita 41
7.2.2. Pengeluaran Untuk Makanan 44
7.2.3. Pengeluaran Untuk Bukan Makanan 44
7.3. Pembangunan Manusia 45

VIII. KETENAGAKERJAAN **50**
8.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 50
8.2. Tingkat Penganguran Terbuka (TPT) 51
8.3. Karakteristik Penduduk Bekerja 51
8.3.1. Lapangan Pekerjaan/Status Pekerjaan 51
8.3.2. Status Pekerjaan 52
8.3.3. Jam Kerja Seminggu 53
8.3.4. Kegiatan Informal 54

IX. PERUMAHAN **59**
9.1. Kondisi Rumah 59
9.2. Fasilitas Rumah 61

X. ANALISIS DATA PENGANGGURAN SEMESTER I TAHUN 2009 **65**

http://sumut.bps.go.id

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 3.1.	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sumatera Utara menurut Kabupaten/Kota 2000-2008	11
Tabel 3.2.	Komposisi Penduduk Provinsi Sumatera Utara menurut Kelompok Umur, 2004 – 2008 (%)	13
Tabel 3.3.	Rasio Beban Ketergantungan Penduduk Provinsi Sumatera Utara menurut Kabupaten/Kota, 2004-2007, (%)	16
Tabel 3.4.	Rasio Jenis Kelamin Penduduk Provinsi Sumatera Utara menurut Kabupaten/Kota, 2004-2008 (%)	18
Tabel 3.5.	Kepadatan Penduduk Provinsi Sumatera Utara menurut Kabupaten/Kota, 2008	20
Table 4.1.	Persentase Penduduk 10 Ke Atas menurut Tingkat Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, 2008	24
Table 4.2.	Angka Melek Huruf Penduduk 10 Tahun Ke Atas menurut Kabupaten/Kota, 2008	26
Tabel 6.1.	Persentase Wanita Berusia 10 Tahun Ke Atas Yang Pernah Kawin menurut Umur Perkawinan Pertama Provinsi Sumatera Utara, 2008	34
Tabel 6.2.	Proporsi Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin Yang Pernah dan Sedang Menggunakan Alat/Cara KB menurut Kabupaten/Kota, 2008	38
Tabel 6.3.	Proporsi Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin menurut Kabupaten/Kota. Dan Alat/Cara KB Yang Digunakan Provinsi Sumatera Utara, 2008	39
Tabel 7.1.	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Untuk Makanan dan Bukan Makanan Provinsi Sumatera Utara, 1995-2008	42
Tabel 7.2.	Distribusi Pengeluaran Makanan dan Bukan Makanan menurut Kabupaten/Kota, 2008	43
Tabel 7.3.	Persentase Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Untuk Makanan dan Bukan MakananProvinsi Sumatera Utara, 2008	45
Tabel 7.4.	Tingkatan Status dan Kriteria Pembangunan Manusia	45
Tabel 7.4.	Perkembangan Tingkatan dan Status Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota, 2006-2008	48

http://sumut.bps.go.id

Halaman

Tabel 8.1.	Jumlah dan Persentase Penduduk 15 tahun Keatas Menurut Kegiatan Seminggu yang Lalu, 2006-2008	50
Tabel 8.2.	Persentase Penduduk Sumatera Utara Berumur 15 tahun Keatas yang Bekerja Selama Informal Menurut Kabupaten/kota dan Tingkat Pendidikan, 2008	55
Tabel 8.3.	Persentase Penduduk Sumatera Utara Berumur 15 tahun Keatas yang Bekerja Selama Informal Menurut Kabupaten/kota dan Lapangan Pekerjaan, 2008	56
Tabel 9.1.	Kondisi Perumahan Sumatera Utara, 2004-2008	60
Tabel 9.2.	Kondisi Fasilitas Rumah Sumatera Utara, 2004-2008	62
Tabel 9.3.	Persentase Rumahtangga menurut Sumber Air Minum dan Daerah Tempat Tinggal Provinsi Sumatera Utara, 2008	63
Tabel 9.4.	Persentase Rumahtangga menurut Tempat Penampungan Akhir Kotoran dan Daerah Tempat Tinggal Provinsi Sumatera Utara, 2008	64
Tabel 10.1.	Komposisi Penduduk Sumatera Utara Berumur 15 tahun Keatas Menurut Wilayah dan Jenis Kelamin, 2008 dan Februari 2009	66
Tabel 10.2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Sumatera Utara Menurut Wilayah dan Jenis Kelamin, 2008-2009	67
Tabel 10.3.	Tingkat Pengangguran Terbuka Sumatera Utara Menurut Wilayah dan Jenis Kelamin, 2008-2009	68
Tabel 10.4.	Jumlah Setengah Penganggur Sumatera Utara Menurut Jenis Penganggur, 2008-2009	69
Tabel 10.5.	Persentase Penduduk Sumatera Utara Berumur 15 tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan, 2008-2009	70
Tabel 10.6.	Persentase Penduduk Sumatera Utara Berumur 15 tahun Keatas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2008-2009	71

http://sumut.bps.go.id

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Grafik 3.1.	Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sumatera Utara, 1980-2008	12
Grafik 4.1.	Perkembangan Partisipasi Sekolah Penduduk Sumatera Utara, 2004-2008	22
Grafik 4.2.	Persentase Penduduk Sumatera menurut Pendidikan ditamatkan, 2004-2008	23
Grafik 4.3.	Perkembangan Tingkat Buta Huruf Penduduk Sumatera Utara, 2004-2008	25
Grafik 5.1.	Perkembangan Tingkat Morbiditas Penduduk Sumatera Utara, 2004-2008	28
Grafik 5.2.	Persentase Penduduk Yang Berobat Sendiri dengan Cara Pengobatannya Provinsi Sumatera Utara, 2008	29
Grafik 5.3.	Persentase Penolong Persalinan Bayi Provinsi Sumatera Utara, 2008	30
Grafik 5.4.	Kecenderungan Angka Kematian Bayi Provinsi Sumatera Utara, 1999-2008	31
Grafik 5.5.	Kecenderungan Angka Harapan Hidup Provinsi Sumatera Utara, 1999-2008	32
Grafik 6.1.	Persentase Perempuan Dengan Usia Kawin Pertama di bawah 17 Tahun menurut Kabupaten/Kota, 2008	35
Grafik 6.2.	Perkembangan Tingkat Fertilitas (TFR) Provinsi Sumatera Utara, 1999 – 2008	36
Grafik 7.1.	Trend Persentase Penduduk Miskin Sumatera Utara, 1999-2009	41
Grafik 7.2.	Perkembangan IPM Sumatera Utara, 1990– 2008	47
Grafik 8.1.	Persentase Penduduk Bekerja di Sumatera Utara Menurut Lapangan Pekerjaan, 2006-2008	52
Grafik 8.2.	Persentase Penduduk Bekerja di Sumatera Utara Menurut Status Pekerjaan, 2008	53
Grafik 8.3.	Persentase Penduduk Bekerja di Sumatera Utara Menurut jam Kerja Seminggu, 2008	54
Grafik 9.1.	Persentase Rumahtangga di Sumatera Utara Menurut Status Kepemilikan Tempat Tinggal, 2008	59
Grafik 9.2.	Persentase Rumahtangga di Sumatera Utara yang Mempunyai Lantai Terluas dari Tanah, 2008	61
Grafik 9.3.	Persentase Rumahtangga di Sumatera Utara yang dengan Sumber Penerangan dari Listrik, 2008	62
Grafik 9.4.	Persentase Rumahtangga menurut Kepemilikan Fasilitas Tempat Buang Air Besar Provinsi Sumatera Utara, 2008	64

http://sumut.bps.go.id

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan bangsa yang secara eksplisit telah dituangkan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sudah merupakan komitmen seluruh Bangsa Indonesia seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Keberhasilan pelaksanaan program pembangunan mutlak memerlukan data dan informasi statistik lengkap baik itu kondisi saat ini maupun perkiraan kondisi di masa mendatang (proyeksi). Berdasarkan data dan informasi yang dikemas melalui suatu indikator makro maka arah perencanaan pembangunan dan evaluasi terhadap program pembangunan yang telah dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Berlandaskan pola pikir demikian, maka diperlukan data dan kajian yang mendalam dan luas mengenai Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Utara.

http://sumut.bps.go.id

1.2. Maksud Dan Tujuan

Penulisan Indikator Kesejahteraan Rakyat dan Analisis Data Pengangguran Semester I Tahun 2009 ini dimaksudkan untuk memberikan informasi yang jelas mengenai kondisi setiap aspek kesejahteraan rakyat di Sumatera Utara sehingga pada akhirnya dapat dijadikan sebagai kompas yang tepat dalam pelaksanaan pembangunan.

Dari analisis Indikator Kesejahteraan Rakyat dan Pengangguran ini diharapkan perencana dan pelaksana maupun pengamat mendapatkan kejelasan mengenai kondisi berbagai dimensi kehidupan yang ada sebagai hasil dan target pembangunan dimasa mendatang. Sehingga rencana maupun kebijakan yang disusun akan bersifat efektif dan efisien utamanya untuk segera melaksanakan suatu aksi nyata terhadap suatu kondisi yang berdasarkan indikator-indikator yang ada, yang pada akhirnya usaha Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud sesuai dengan yang dicita-citakan.

1.3. Sumber Data

Data yang digunakan sebagai dasar analisis adalah berdasarkan data primer Badan Pusat Statistik (BPS) yang berasal dari sensus dan survei, yaitu diantaranya Sensus Penduduk (SP), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dan survei lainnya yang telah dilaksanakan. Selain itu juga diperkaya dengan data sekunder terutama yang berasal dari instansi lainnya dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

1.4. Sistematika Penyajian

Penyajian data dan analisis dalam dokumen ini dikelompokkan ke dalam 10 (sepuluh) bagian, yaitu :

Bagian pertama merupakan pendahuluan yang memaparkan latar belakang, maksud dan tujuan, sumber data dan sistematika penyajian publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat 2008 dan Analisis Data Pengangguran semester I tahun 2009. Selanjutnya bagian dua gambarkan secara singkat kondisi umum daerah, Kemudian dilanjutkan penyajian aspek kependudukan yang mencakup jumlah/pertumbuhan penduduk, kepadatan/penyebaran penduduk, struktur umur/beban ketergantungan, serta tingkat kelahiran *(fertilitas)*. Pada bagian ketiga dibahas tingkat kesejahteraan dan kualitas manusia, yang ditinjau melalui aspek kemiskinan, pola konsumsi dan kualitas pembangunan manusia. Bagian keempat publikasi ini memaparkan kondisi pendidikan di Sumatera Utara, yang melihat dari sisi kualitas pendidikan penduduk dan sarana pendidikan. Kemudian dilanjutkan pembahasan kondisi kesehatan yang mencakup status kesehatan penduduk, pelayanan kesehatan dan tenaga/sarana kesehatan. Kemudian selanjutnya pada bagian keenam membahas aspek ketenagakerjaan. Penyajian pada publikasi ini ditutup dengan analisis data pengangguran semester I tahun 2009.

http://sumut.bps.go.id

BAB II
PENJELASAN TEKNIS

2.1. Kependudukan

- **Tipe Daerah,** penentuan suatu desa termasuk daerah perkotaan atau pedesaan adalah berdasarkan indikator komposit (indikator gabungan) yang terdiri dari: kepadatan penduduk, persentase rumah tangga tani, dan jumlah fasilitas perkotaan.

Variabel kepadatan penduduk mempunyai skor antara 1-10, nilai satu adalah desa dengan kepadatan kurang dari 500 orang per km^2, nilai dua adalah desa dengan kepadatan antara 500-999 orang per km^2, dan seterusnya sampai dengan nilai sepuluh yaitu desa dengan kepadatan lebih besar atau sama dengan 5000 orang per km^2, dengan interval setiap kelas sebesar 500, kecuali kelas kedua dan terakhir yang intervalnya 1000.

Skor persentase rumah tangga pertanian berkisar antara 1-10. Nilai satu jika desa tersebut memiliki 95 persen atau lebih rumah tangga pertanian, dua jika 91-95 persen, dan seterusnya sampai dengan 10, jika desa mempuyai 25 persen rumah tangga pertanian atau kurang.

Skor untuk jenis fasilitas perkotaan berkisar antara 2-10. Nilai dua adalah desa tanpa fasilitas perkotaan sama sekali, nilai tiga jika fasilitas perkotaan ada satu buah, dan seterusnya sampai nilai sepuluh untuk desa yang memiliki minimal 8 jenis fasilitas perkotaan.

Jumlah nilai dari ketiga variabel tersebut kemudian digunakan untuk menentukan apakah suatu desa termasuk daerah perkotaan atau perdesaan. Desa dengan nilai gabungan mencapai lebih dari dua puluh tiga digolongkan sebagai desa perkotaan. Desa-desa dengan skor antara 17-22 akan ditentukan berdasarkan penelitian lapangan tentang perkembangan masing-masing.

- Penduduk adalah setiap orang, baik warga negara Republik Indonesia maupun warga negara asing yang berdomisili di dalam wilayah Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap

http://sumut.bps.go.id

- Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk per kilometer persegi
- Rata-rata laju pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan yang dinamis antara kekuatanyang menambah dan kekuatan yang mengurangi banyaknya penduduk. Kekuatan yang menambah banyaknya penduduk adalah kelahiran dan migrasi masuk (penduduk datang) sedangkan kekuatan yang mengurangi banyaknya penduduk adalah kematian dan migrasi keluar (penduduk pergi). Laju pertumbuhan alamiah adalah laju pertumbuhan yang hanya dipengaruhi faktor kelahiran dan faktor kematian sedangkan laju pertumbuhan sosial hanya dipengaruhi oleh migrasi
- Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Angka ini dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki un-tuk setiap 100 penduduk perempuan.
- Angka Beban Tanggungan (ABT) adalah perbandingan antara kelompok anak-anak (umur 0-14 tahun) dan kelompok lansia (65 tahun atau lebih) dengan usia produktif (15-64 tahun).

http://sumut.bps.go.id

2.2. Pendidikan

- Sekolah adalah kegiatan belajar di sekolah formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, termasuk pendidikan yang disamakan.
- Tidak/belum pernah sekolah adalah mereka yang tidak atau belum pernah bersekolah di sekolah formal, misalnya tamat/belum tamat Taman Kanak-Kanak tetapi tidak melanjutkan ke Sekolah Dasar.
- Masih bersekolah adalah mereka yang sedang mengikuti pendidikan di pendidikan dasar, menengah atau tinggi.
- Tidak sekolah lagi adalah mereka yang pernah bersekolah tetapi pada saat pencacahan tidak bersekolah lagi.
- Tamat sekolah adalah menyelesaikan pendidikan pada kelas atau ting-kat terakhir suatu jenjang pendidikan yang pernah diikuti (ditamatkan) oleh seseorang yang sudah tidak sekolah lagi atau sedang diikuti oleh seseorang yang masih sekolah.
- Jenjang pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki (ditamatkan) adalah jenjang pendidikan yang pernah diduduki (dita-matkan) oleh seseorang yang sudah tidak sekolah lagi atu sedang didu-duki oleh seseorang yang masih sekolah.

- Dapat membaca dan menulis adalah mereka yang dapat membaca dan menulis surat/kalimat sederhana dengan sesuatu huruf. Orang buta yang dapat membaca dan menulis huruf braille dan orang cacat yang sebelumnya dapat membaca dan menulis kemudian karena cacatnya tidak dapat membaca dan menulis, digolongkan dapat membaca dan menulis. Sedangkan orang yang hanya dapat membaca saja tetapi tidak dapat menulis, dianggap tidak dapat membaca dan menulis (buta huruf).

2.2. Kesehatan Dan Gizi

- Keluhan kesehatan adalah keadaan seseorang yang merasa terganggu oleh kondisi kesehatan, kejiwaan, kecelakaan, atau lainnya. Seseorang yang menderita penyakit kronis dianggap mempunyai ke-luhan kesehatan walaupun pada waktu survei (satu bulan terakhir) yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya.
- Imunisasi adalah memasukkan kuman penyakit yang sudah dilemahkan kedalam tubuh agar tubuh mempunyai kekebalan terhadap penyakit tertentu.
- Konsultasi adalah datang ke tempat pelayanan kesehatan untuk mem-bincangkan masalah kesehatan, termasuk konsultasi KB dan konsultasi ke dokter.
- Pemeriksaan kesehatan adalah pengamatan tingkat kesehatan se-seorang baik karena mempunyai keluhan maupun untuk mengetahui ada tidaknya penyakit sedini mungkin. Pemeriksaan kesehatan dapat bersifat menyeluruh, atau sebagian dari tubuh, atau sebagian kecil saja dari tubuh.
- Rawat jalan atau berobat jalan adalah kegiatan atau upaya responden yang mempunyai keluhan kesehatan untuk memeriksakan atau meng-atasi gangguan/keluhan kesehatannya dengan mendatangi tempat-tem-pat pelayanan kesehatan modern atau tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas medis ke rumah pasien, membeli obat atau melakukan pengobatan sendiri.
- Rawat inap adalah kegiatan atau upaya responden yang mengalami ke-luhan kesehatan dengan mendatangi tempat pelayanan kesehatan dan harus menginap.
- Angka Kematian Bayi adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi berumur di bawah 1 tahun per 1000 kelahiran dalam satu tahun.
- Angka Harapan Hidup adalah rata-rata lama hidup yang akan dicapai oleh bayi yang baru lahir pada suatu daerah.

http://sumut.bps.go.id

- Angka Fertilitas Total adalah banyaknya anak yang dilahirkan oleh wanita selama masa reproduksinya dengan asumsi bahwa perilaku kelahirannya sama untuk setiap kelompok umur.

2.3. Fertilitas Dan Keluarga Berencana

- Anak lahir hidup adalah anak yang pada waktu dilahirkan menun-jukkan tanda-tanda kehidupan walaupun hanya beberapa saat saja, seperti jantung berdenyut, bernapas dan menangis.
- Angka Pertumbuhan Alamiah adalah selisih antara angka kelahiran dan angka kematian.
- Peserta keluarga berencana (akseptor) adalah orang yang mem-praktekkan salah satu metode kontrasepsi.
- Peserta keluarga berencana (akseptor) baru adalah orang yang baru pertama kali memakai/mempergunakan metode kontrasepsi dan ak-septor sesudah persalinan/keguguran.
- Peserta keluarga berencana (akseptor) aktif adalah orang yang pada saat ini memakai metode kontrasepsi untuk penjarangan kehamilan.
- Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan yang istrinya berumur 15-49 tahun

2.4. Konsumsi Dan Pengeluaran Rumah Tangga

- Konsumsi/pengeluaran rumah tangga adalah pengeluaran untuk kebutuhan (konsumsi) semua anggota rumah tangga. Secara umum pe-ngeluaran rumah tangga dibagi menjadi pengeluaran untuk makanan (pengeluaran untuk makanan, minuman, dan tembakau) dan bukan makanan (pengeluaran untuk perumahan, aneka barang dan jasa, pakaian, pajak dan pesta)
- Konsumsi rata-rata per kapita setahun, diperhitungkan dari konsumsi rata-rata per kapita dalam seminggu dikalikan dengan 52.
- Pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan, mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi yang dikonsumsi di luar rumah dan juga termasuk minuman tembakau dan sirih dalam jangka waktu sebulan.
- Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita adalah hasil bagi PDRB Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

http://sumut.bps.go.id

- Pendapatan regional per kapita diperoleh dengan cara membagi Pro-duk Domestik Regional Netto (PDRN) atas dasar biaya faktor dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.
- Pendapatan per kapita adalah Produk Regional Netto dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.
- Konsumsi beras mencakup keseluruhan beras termasuk beras ketan.
- Konsumsi jagung termasuk jagung pocelan, jagung basah, jagung kering dan tepung jagung yang keseluruhannya telah dikonversikan ke-dalam jagung pocelan.

2.5. Perumahan

- Bangunan fisik adalah tempat perlindungan yang mempunyai dinding, lantai dan atap, baik tetap maupun sementara yang digunakan untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal.
- Bangunan sensus adalah sebagian atau seluruh bangunan fisik yang mempunyai pintu keluar/masuk sendiri.
- Luas lantai adalah luas lantai dari bangunan tempat tinggal atau jumlah dari setiap bagian tempat tinggal yang ditempati oleh anggota rumah tangga dan dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari.
- Rumah tangga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Termasuk pula seseorang yang mendiami seba-gian atau seluruh dan mengurus keperluan sendiri.
- Dinding adalah sisi luar/batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan rumah tangga atau bangunan lain.
- Atap adalah penutup bagian atas bangunan yang melindungi orang yang mendiami dibawahnya dari teriknya matahari, hujan dan seba-gainya. Untuk bangunan bertingkat, atap yang dimaksud adalah bagian teratas dari bangunan tersebut.
- Air ledeng adalah sumber air yang berasal dari air yang telah diproses menjadi jernih sebelum dialirkan kepada konsumen melalui instalasi berupa saluran air. Sumber air ini diusahakan oleh PM/PDAM/BPAM (Perusahaan Air Minum/Perusahaan daerah Air Minum/Badan Penge-lola Air Minum).

http://sumut.bps.go.id

- Air Sumur/perigi terlindung adalah bila lingkar mulut sumur/perigi tersebut dilindungi oleh tembok paling sedikit 0,8 meter di atas tanah dan sedalam 3 meter di bawah tanah dan di sekitar mulut sumur ada lantai semen sejauh 1 meter dari lingkar mulut/perigi.
- Kloset/dudukan leher angsa adalah jamban/kakus yang di bawah dudukannya terdapat saluran berbentuk "U" (seperti leher angsa) dengan maksud menampung air untuk menahan agar bau tinja tidak keluar.
- Plengsengan adalah jamban/kakus yang di bawah dudukannya terdapat saluran rata yang dimiringkan ke pembuangan kotoran.
- Cemplung/cubluk adalah jamban/kakus yang di bawah dudukannya tidak ada saluran langsung ke tempat pembuangan/penampungan akhir.
- WC lainnya adalah yang tidak mempunyai tempat untuk duduk/jongkok termasuk yang tidak mempunyai jamban/kakus.

http://sumut.bps.go.id

2.6. Ketenagakerjaan

- Angkatan Kerja adalah mereka yang berumur 15 tahun ke atas dan selama semingu yang lalu mempunyai pekerjaan, baik bekerja maupun untuk sementara tidak bekerja karena suatu sebab seperti menungggu panen, sedang cuti dan sedang menunggu pekerjaan berikutnya (pekerja bebas profesional seperti dukun dan dalang). Disamping itu termasuk pula mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan atau mengharapkan mendapat pekerjaan.
- Bukan Angkatan Kerja adalah mereka yang berumur 15 tahun ke atas dan selama seminggu yang lalu hanya bersekolah, mengurus rumah tangga, dan tidak melakukan suatu kegiatan yang dapat dimasukkan dalam kategori bekerja dan mencari kerja.
- Kegiatan yang terbanyak dilakukan adalah kegiatan yang menggu-nakan waktu terbanyak dibanding dengan kegiatan lainnya.
- Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan selama pa-ling sedikit satu jam secara berturut-turut dan tidak terputus dalam satu minggu, termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam usaha/kegiatan ekonomi.

- Punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja adalah mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu tidak bekerja karena suatu sebab seperti sakit, cuti, menunggu panen, dan mogok.
- Lapangan Usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/instansi tempat seseorang bekerja atau pernah bekerja.
- Status pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan, misalnya berusaha (sebagai pengusaha), buruh/karyawan, atau pekerja keluarga tidak dibayar.
- Jam kerja adalah jumlah waktu (dalam jam) yang digunakan untuk be-kerja.
- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase pendu-duk yang termasuk dalam angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja (15 tahun keatas).

Penduduk yang menganggur adalah mereka yang termasuk angkatan kerja dan tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan termasuk me-nunggu pekerjaan bagi yang sudah diterima bekerja tetapi selama seminggu yang lalu belum mulai bekerja.

http://sumut.bps.go.id

BAB III
KEPENDUDUKAN

Jumlah penduduk yang besar secara teoritis merupakan salah satu kekayaan dan modal dasar pembangunan. Hal ini dapat terjadi jika jumlah penduduk yang besar dapat diberdayakan sesuai kodrat, keahlian dan bidang kerjanya masing-masing. Sebaliknya apabila jumlah penduduk yang besar tadi tidak dapat diberdayakan dan dikendalikan secara bijak dan terencana bahkan akan menjadi beban pembangunan. Oleh sebab itu untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional, dalam penanganan masalah kependudukan pemerintah tidak saja mengarahkan pada upaya pengendalian jumlah penduduk, tapi juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Aspek kependudukan yang perlu mendapat perhatian mencakup jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk. Disamping itu program perencanaan pembangunan sosial harus mendapat prioritas utama karena bermuara kepada peningkatan kesejahteraan penduduk.

Komposisi penduduk menurut struktur umur penduduk merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana beban tanggungan penduduk. Ketidakseimbangan komposisi antara kelompok umur produktif dengan non produktif akan menyebabkan permasalahan yang harus segera dicari jalan keluarnya. Demikian juga halnya dengan distribusi atau penyebaran penduduk antar wilayah, sangat dipengaruhi oleh tingkat pemerataan hasil pembangunan. Tingkat pemerataan hasil pembangunan akan mempengaruhi penyebaran dan tingkat kepadatan penduduk. Penduduk biasanya akan melakukan migrasi ke wilayah dimana terdapat fasilitas-fasilitas yang lebih baik dibanding wilayah yang ditempati sebelumnya

Untuk itu aspek kependudukan perlu dipertimbangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk seperti: arus migrasi, angka kelahiran dan kematian. Ketiga komponen ini turut serta dalam perencanaan pembangunan ekonomi, sosial budaya, dan politik serta pertahanan.

http://sumut.bps.go.id

Data kependudukan sangat dibutuhkan baik oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Dari data kependudukan dapat dibuat berbagai perencanaan kebutuhan fasilitas penunjang kesejahteraan masyarakat, seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, pusat perbelanjaan, tempat rekreasi, dan fasilitas lainnya. Data kepen-dudukan yang terkait diantaranya data tentang jumlah penduduk, kepadatan, dan penyebaran penduduk serta data struktur umur penduduk.

3.1. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2000, jumlah penduduk Sumatera Utara tercatat sebanyak 11,51 juta jiwa dengan rata-rata laju pertumbuhan pertahun sebesar 1,20 persen sejak tahun 1990. Diperkirakan pada tahun 2008, jumlah penduduk Sumatera Utara tercatat sebesar 13.042.317 jiwa. Meskipun secara absolut jumlah penduduk terus bertambah, namun secara relatif laju pertumbuhan penduduk selama 2 (dua) dekade (1980-2000) terus mengalami penurunan. Pada periode 1980-1990 rata-rata laju pertumbuhan penduduk tercatat sebesar 2,06 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan periode 1990-2000 yang tercatat hanya sebesar 1,20 persen atau meningkat dari 10.256.027 jiwa pada tahun 1990 menjadi 11.513.973 jiwa pada tahun 2000. Selanjutnya periode 2000-2008 laju pertumbuhan penduduk Sumatera Utara diperkirakan sebesar 1,57 persen *(grafik 3.1)*.

Dengan jumlah penduduk yang relatif besar dan kecenderungan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk tersebut, permasalahan kependudukan di Sumatera Utara perlu mendapat perhatian yang cukup serius. Oleh karena itu, upaya mengendalikan pertumbuhan penduduk disertai dengan peningkatan kesejahteraan penduduk merupakan suatu upaya yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan bersinergis dengan program-program pembangunan lainnya yang dilaksanakan.

http://sumut.bps.go.id

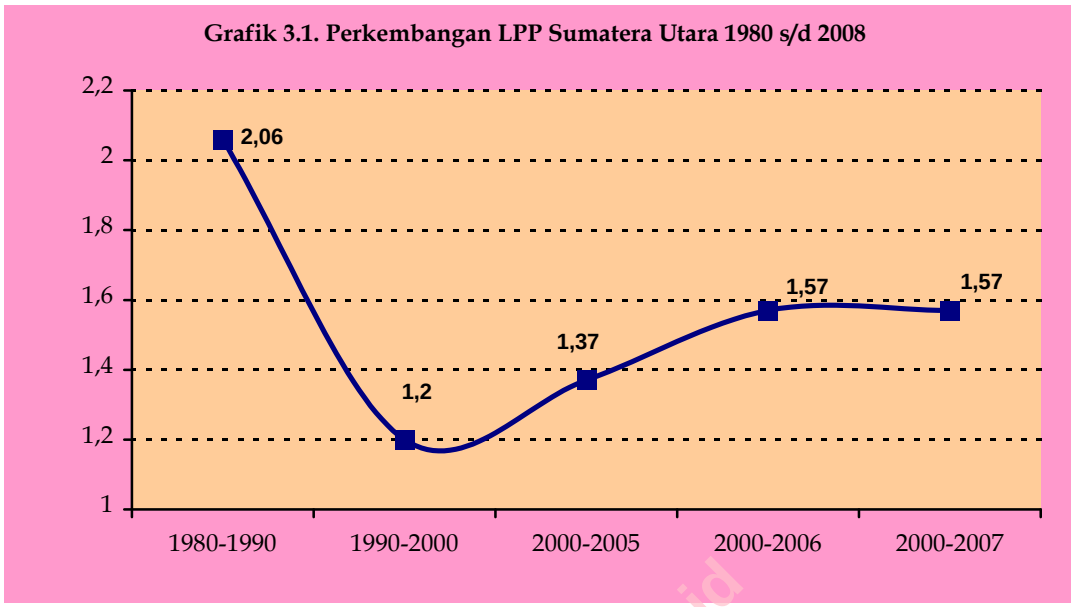

Pada tabel 3.1. dapat dilihat jumlah penduduk Sumatera menurut kabupaten/kota serta laju pertumbuhan penduduk periode 2000-2008. Terdapat beberapa daerah kabupaten/kota yang laju pertumbuhan penduduknya relatif tinggi di atas 3 persen adalah Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar 3,19 persen, dan Kabupaten Karo 3,05 persen. Tingginya laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah disebabkan daerah ini menjadi pusat perkembangan ekonomi baru di Pantai Barat dan daerah transit dari beberapa kabupaten sekitarnya seperti Kabupaten Nias, Nias Selatan, dan Tapanuli Selatan. Sedangkan tingginya laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Karo yang merupakan salah satu daerah agraris utama yang termasuk dalam kawasan Agropolitan di Sumatera Utara kemungkinan menjadi daya tarik bagi penduduk di sekitar kabupaten lainnya untuk melakukan perpindahan ke daerah tersebut. Sebaliknya beberapa daerah lainnya di Sumatera Utara laju pertumbuhan penduduknya sangat rendah antara lain Kota Pematang Siantar sebesar -0,14 persen, Simalungun -0,04 persen dan Toba Samosir sebesar -0,03 persen.

http://sumut.bps.go.id

Tabel 3.1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sumatera Utara menurut Kabupaten/Kota, 2000-2008

Kota/Kabupaten	Tahun		Laju Pertumbuhan/ tahun (%) 2000-2008
	2000 (jiwa)	*2008 (jiwa)*	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
Kabupaten			
1. Nias	683.416	443.492	0,59
2. Mandailing Natal	359.849	423.712	2,06
3. Tapanuli Selatan	734.364	263.812	1,55
4. Tapanuli Tengah	244.679	314.632	3,19
5. Tapanuli Utara	407.711	267.595	0,46
6. Toba Samosir	304.125	171.833	-0,03
7. Labuhan Batu	844.924	1.027.964	2,48
8. Asahan	935.855	683.529	1,70
9. Simalungun	855.802	853.112	-0,04
10. Dairi	292.857	271.983	0,84
11. Karo	283.713	360.880	3,05
12. Deli Serdang	1.959.488	1.738.431	2,40
13. Langkat	906.565	1.042.523	1,76
14. Nias Selatan	1)	272.848	1)
15. Humbang Hasundutan	1)	155.290	1)
16. Pakpak Bharat	1)	41.062	1)
17. Samosir	1)	131.549	1)
18. Serdang Bedagai	1)	630.728	1)
19. Batubara	1)	382.474	1)
20. Padang Lawas Utara	1)	193.278	1)
21. Padang Lawas	1)	185.209	1)
Kota			
22. Sibolga	82.310	94.614	1,76
23. Tanjung Balai	132.438	163.679	2,68
24. Pematang Siantar	241.524	238.773	-0,14
25. Tebing Tinggi	125.006	141.059	1,52
26. Medan	1.905.587	2.102.105	1,23
27. Binjai	213.760	252.652	2,11
28. Padangsidimpuan	1)	188.499	1)
Sumatera Utara	**11.513.973**	**13.042.317**	**1,57**

Sumber : Sumatera Utara dalam Angka, BPS Provinsi Sumatera Utara
Keterangan : 1) Masih bergabung dengan Kabupaten induk (Nias, Taput, Dairi, Tobasa, Deli Serdang, Asahan dan Tapsel)

http://sumut.bps.go.id

3.2. Struktur Umur dan Angka Beban Ketergantungan

Indikator lain yang berhubungan dengan komposisi umur adalah angka beban ketergantungan ***(Dependency Ratio)***. Angka beban ketergantungan didefinisikan sebagai beban yang harus ditanggung oleh penduduk yang berada dalam usia produktif secara ekonomi dalam menanggung penduduk yang tidak produktif.

Menurut Mantra, suatu daerah atau negara dikatakan berstruktur umur muda, apabila kelompok penduduk yang berusia di bawah 15 tahun jumlahnya besar (lebih dari 35 persen), sedangkan besarnya kelompok penduduk usia 65 tahun ke atas kurang dari 3 persen. Sebaliknya status daerah atau negara dikatakan berstruktur umur tua, apabila kelompok penduduk yang berumur 15 tahun ke bawah jumlahnya kecil (kurang dari 35 persen dari seluruh penduduk) dan persentase penduduk diatas 65 tahun sekitar 15 persen *(Mantra, 1985).*

http://sumut.bps.go.id

Tabel 3.2 Komposisi Penduduk Provinsi Sumatera Utara menurut Kelompok Umur, 2004–2004

Kelompok Umur	2004	2006	2007	2008
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
Anak-anak (0 -14)	33,72	31,96	32,17	33,16
Produktif (15 – 64)	62,57	64,11	63,94	62,42
Lansia (65 +)	3,71	3,93	3,89	4,43
TOTAL	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Angka Beban Tanggungan Anak	53,89	49,85	50,31	53,12
Angka Beban Tanggungan Tua	5,93	6,13	6,08	7,10
Angka Beban Tanggungan (ABT)	**59,82**	**55,98**	**56,40**	**60,22**

Sumber : Sumatera Utara dalam Angka, BPS Provinsi Sumatera Utara

Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan diantaranya terlihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur. Hal ini tercermin dengan semakin rendahnya proporsi penduduk usia tidak produktif (kelompok umur 0-14 tahun dan kelompok umur 65 atau lebih), yang berarti akan semakin rendahnya angka rasio beban ketergantungan. Semakin kecil angka rasio beban ketergantungan akan memberikan

kesempatan bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya. Bila dilihat komposisi penduduk menurut umur pada tahun 2008, ternyata penduduk Sumatera Utara tidak tergolong struktur umur muda dan juga tidak termasuk kelompok dengan struktur umur tua. Ini ditunjukkan dari persentase penduduk umur muda (di bawah 15 tahun) sebesar 33,16 persen dan penduduk umur 65 tahun ke atas (umur tua) sebesar 4,43 persen, dengan umur median sebesar 22 tahun. Walaupun demikian, komposisi umur penduduk tersebut mengarah ke struktur umur muda, ditandai dengan jumlah penduduk umur muda cukup besar. Hal ini memberikan implikasi bahwa potensi kelompok umur muda perlu men-dapatkan perhatian dan pengembangan sehingga mampu meng-hasilkan tenaga-tenaga trampil, mandiri untuk mengisi dan menciptakan peluang-peluang ekonomi yang tersedia.

Bertambah besarnya proporsi penduduk usia produktif, secara langsung mengakibatkan angka beban tanggungan menjadi turun. Pada tahun 2008 tingkat beban ketergantungan penduduk sebesar 60,22 persen yang terdiri dari beban tanggungan penduduk muda sebesar 53,12 persen dan sisanya sebesar 7,10 persen merupakan beban ketergantungan penduduk tua.

Selanjutnya angka beban ketergantungan bila dirinci menurut kabupaten/kota cukup bervariasi. Pada tahun 2007, angka beban ketergantungan atau tanggungan tertinggi terdapat di Kabupaten Humbang Hasundutan sebesar 77,06. Tingginya beban tanggungan ini diduga karena telah terjadi perpindahan penduduk usia produktif dengan tujuan bekerja atau melanjutkan sekolah ke daerah yang lebih berpotensi. Dengan rendahnya rasio ketergantungan penduduk di sutatu wilayah akan memberikan peluang untuk melakukan investasi, antara lain melalui pendidikan dan kesehatan terhadap usia 0-14 tahun. Kota Binjai memiliki angka beban tanggungan yang paling kecil, yaitu 42,30. Tabel 3.3 secara rinci memperlihatkan angka beban ketergantungan setiap kabupaten/kota di Sumatera Utara.

http://sumut.bps.go.id

Tabel 3.3 Rasio Beban Ketergantungan Penduduk Provinsi Sumatera Utara menurut Kabupaten/Kota, 2002-2007

Kabupaten/Kota	2002	2004	2006	2007
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
Kabupaten				
1. Nias	74,19	71,50	61,45	62,54
2. Mandailing Natal	79,12	74,06	60,48	63,91
3. Tapanuli Selatan	71,70	78,32	67,20	63,91
4. Tapanuli Tengah	80,21	79,50	73,01	63,11
5. Tapanuli Utara	77,37	76,46	76,46,	69,81
6. Toba Samosir	82,05	69,89	69,46	63,78
7. Labuhan Batu	69,03	67,87	61,92	58,49
8. Asahan	65,84	58,35	60,59	60,14
9. Simalungun	55,86	58,78	56,03	54,11
10. Dairi	71,82	76,09	63,37	67,22
11. Karo	55,28	58,81	57,80	55,37
12. Deli Serdang	58,45	55,64	51,45	49,02
13. Langkat	54,04	54,46	51,95	52,14
14. Nias Selatan	1)	1)	71,23	69,83
15. Humbang Hasundutan	1)	1)	69,75	77,06
16. Pakpak Bharat	1)	1)	75,50	71,32
17. Samosir	1)	1)	64,42	70.84
18. Serdang Bedagai	1)	1)	51,26	47,56
19. Batubara	1)	1)	1)	55,77
Kota				
20. Sibolga	60,00	59,97	55,57	49,01
21. Tanjung Balai	62,00	62,05	56,65	57,42
22. Pematang Siantar	52,74	52,09	51,13	46,85
23. Tebing Tinggi	51,79	47,23	52,93	47,88
24. Medan	47,56	48,19	45,01	44,01
25. Binjai	50,83	46,20	48,39	42,30
26. Padangsidimuan	1)	56,62	57,43	52,16
Sumatera Utara	**61,00**	**59,72**	**55,98**	**54,01**

Sumber : Sumatera Utara dalam Angka, BPS Provinsi Sumatera Utara
Keterangan : 1) Masih bergabung dengan Kabupaten induk (Nias, Taput, Dairi, Tobasa, Deli Serdang dan Tapsel)

http://sumut.bps.go.id

3.3. Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio)

Besar kecilnya rasio jenis kelamin dipengaruhi oleh pola mortalitas dan migrasi penduduk suatu daerah. Jika rasio jenis kelamin di atas 100, artinya jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan di daerah tersebut.

Jumlah penduduk perempuan di Sumatera Utara umumnya selalu lebih banyak dari penduduk laki-laki, yang diperlihatkan melalui rasio jenis kelaminnya. Pada tahun

2006 tercatat rasio jenis kelamin adalah sebesar 100,09 artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 100,09 penduduk laki-laki. Kemudian pada tahun 2008 penduduk perempuan lebih banyak dari laki-laki yaitu masing-masing 6.553.317 jiwa dan 6.489.000 jiwa. Dengan demikian, rasio jenis kelamin penduduk pada tahun 2008 sebesar 99,02, artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 99,02 penduduk laki-laki.

Dilihat masing-masing kabupaten/kota di Sumatera Utara, pada tahun 2008 rasio jenis kelamin tertinggi adalah Kabupaten Labuhan Batu sebesar 102,09, kemudian Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Tanjung Balai yaitu masing-masing sebesar 101,13 dan 100,13. Sedangkan rasio jenis kelamin terendah terdapat di Kabupaten Mandailing Natal sebesar 95,95, kemudian Kabupaten Nias dan Kota Tebing Tinggi masing-masing sebesar 96,24 dan 96,39. Rasio jenis kelamin menurut kabupaten/kota di Sumatera Utara pada tahun 2008 dapat dilihat pada Tabel 3.4.

http://sumut.bps.go.id

Tabel 3.4 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Provinsi Sumatera Utara menurut Kabupaten/Kota, 2006-2008

Kota/Kabupaten	2006	2007	2008
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
Kabupaten			
1. Nias	99,04	96,13	96,24
2. Mandailing Natal	96,23	95,84	95,95
3. Tapanuli Selatan	97,81	97,15	97,47
4. Tapanuli Tengah	100,94	101,02	101,13
5. Tapanuli Utara	98,40	96,36	96,46
6. Toba Samosir	97,28	96,82	96,93
7. Labuhan Batu	102,14	101,98	102,09
8. Asahan	101,30	99,11	99,21
9. Simalungun	100,48	100,28	100,38
10. Dairi	99,42	98,49	98,59
11. Karo	99,18	96,83	96,94
12. Deli Serdang	101,30	100,14	100,25
13. Langkat	102,61	99,98	100,09
14. Nias Selatan	98,30	97,50	97,6
15. Humbang Hasundutan	98,25	97,65	97,76
16. Pakpak Bharat	99,24	97,40	97,5
17. Samosir	97,28	96,88	96,98
18. Serdang Bedagai	101,30	100,77	100,88
19. Batubara	1)	99,58	99,69
20. Padang Lawas Utara	2)	2)	97,05
21. Padang Lawas	2)	2)	97,15
Kota			
22. Sibolga	102,43	100,37	100,48
23. Tanjung Balai	100,91	100,82	100,93
24. Pematang Siantar	98,39	97,37	97,47
25. Tebing Tinggi	98,28	96,29	96,39
26. Medan	98,84	97,76	97,86
27. Binjai	100,57	98,38	98,49
28. Padangsidimpuan	99,25	97,55	97,65
Sumatera Utara	**100,09**	**98,91**	**99,02**

Sumber : Sumatera Utara dalam Angka, BPS Provinsi Sumatera Utara
Keterangan : 1) Masih bergabung dengan Kabupaten Asahan
2) Masih Bergabung dengan Kabupaten Tapanuli Selatan

http://sumut.bps.go.id

3.4. Kepadatan Penduduk

Masalah kependudukan lainnya yang cukup serius adalah penyebaran penduduk antar daerah dimana kondisinya masih timpang, sehingga kepadatan untuk masing-masing kabupaten/kota belum merata. Kepadatan penduduk biasanya berpusat di daerah perkotaan yang umumnya memiliki fasilitas yang dibutuhkan oleh penduduk wilayah pedesaan untuk berusaha di daerah perkotaan. Ketidakmerataan atau ketimpangan sebaran penduduk tampak lebih jelas jika dikaitkan dengan besarnya variasi luas antar daerah. Masalah sering timbul yang diakibatkan oleh kepadatan penduduk terutama mengenai perumahan, kesehatan dan keamanan. Oleh karena itu, distribusi penduduk harus menjadi perhatian khusus pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.

Potret tingkat kepadatan penduduk yang tinggi umumnya terkonsentrasi di daerah kota yang memiliki ketersedian fasilitas yang mencukupi dan memadai. Faktor inilah yang merupakan pendorong penduduk untuk melakukan perpindahan (migrasi). Penyebaran penduduk dari tahun ke tahun masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Kota Sibolga yang berada di Pantai Barat Sumatera Utara, luasnya hanya 0,02 persen dari luas daratan Sumatera Utara merupakan kota terpadat di Sumatera Utara. Pada tahun 2008, kepadatan penduduk Kota Sibolga sekitar 8.601 jiwa setiap kilometer persegi. Selanjutnya, Kota Medan sebagai ibukota Provinsi Sumatera Utara yang luasnya 265,10 kilometer persegi atau 0,37 persen dari luas daratan Sumatera Utara, setiap kilometer persegí ditempati 7.932 jiwa, dan sekitar 16,23 persen penduduk Sumatera Utara berada di Kota Medan. Kota Pematang Siantar sebagai kota perdagangan terbesar kedua setelah Kota Medan, merupakan kota terpadat ketiga, dengan 2.985 jiwa penduduk menempati setiap kilometer persegi wilayah kota tersebut.

Sebaliknya gambaran tingkat kepadatan penduduk yang rendah tersebar di wilayah kabupaten di Sumatera Utara. Kabupaten Pakpak Bharat (pemekaran dari Kabupaten Dairi) hanya dihuni oleh 34 jiwa per kilometer persegi.

http://sumut.bps.go.id

Tabel 3.5. Kepadatan Penduduk Provinsi Sumatera Utara menurut Kabupaten/Kota, 2008

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas Area (Km²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km²)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
Kabupaten			
1. Nias	443.492	3.495,39	127
2. Mandailing Natal	423.712	6.620,70	64
3. Tapanuli Selatan	263.812	12.163,65	61
4. Tapanuli Tengah	314.632	2.158,00	146
5. Tapanuli Utara	267.595	3.764,65	71
6. Toba Samosir	171.833	2.352,35	73
7. Labuhan Batu	1.027.964	9.223,18	111
8. Asahan	688.529	3.675,79	187
9. Simalungun	853.112	4.368,60	194
10. Dairi	271.983	1.927,80	141
11. Karo	360.880	2.127,25	170
12. Deli Serdang	1.738.431	2.486,14	699
13. Langkat	1.042.523	6.263,29	166
14. Nias Selatan	272.848	1.625,91	168
15. Humbang Hasundutan	155.290	2.297,20	68
16. Pakpak Bharat	41.062	1.218,30	34
17. Samosir	131.549	2.433,50	54
18. Serdang Bedagai	630.728	1.913,33	330
19. Batubara	382.474	904,96	423
20. Padang Lawas Utara	193.278	1)	1)
21. Padang Lawas	185.209	1)	1)
Kota			
22. Sibolga	94.614	10,77	8.601
23. Tanjung Balai	163.679	61,52	2.640
24. Pematang Siantar	238.773	79,97	2.985
25. Tebing Tinggi	141.059	38,44	3.712
26. Medan	2.102.105	265,10	7.932
27. Binjai	252.652	90,24	2.807
28. P. Sidempuan	188.499	114,65	1.639
Sumatera Utara	**13.042.317**	**71.680,68**	**182**

Sumber : Sumatera Utara dalam Angka, BPS Provinsi Sumatera Utara

Selanjutnya Kabupaten Tapanuli Selatan yang merupakan kabupaten terluas wilayah daratannya (16,97 persen dari luas wilayah Sumatera Utara) hanya dihuni sekitar 61 jiwa penduduk setiap kilometernya. Kabupaten Deli Serdang yang wilayahnya berbatasan dengan Kota Medan merupakan kabupaten terpadat diantara kabupaten lainnya di Sumatera Utara, yaitu 699 jiwa per kilometer persegi.

BAB IV
PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan sarana untuk membentuk manusia-manusia yang terampil dan produktif sehingga pada gilirannya dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh kualitas sistem pendidikan. Oleh sebab itu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang salah satu bagiannya mengamanatkan bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Demikian pula dijelaskan dalam Batang Tubuh UUD 1945 pasal 28 dan pasal 31 yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Oleh sebab itu peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas merupakan amanat yang harus dilaksanakan bangsa ini.

Agar pendidikan dapat dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing individu, maka pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah. Pada program pembangunan pendidikan nasional yang akan dilakukan saat ini telah pula mempertimbangkan kesepakatan-kesepakatan internasional seperti Pendidikan Untuk Semua ***(Education For All)***, Konvensi Hak Anak (***Convention on the Right of Child)*** dan ***Millenium Development Goals (MDGs)*** yang secara jelas menekankan pentingnya pendidikan sebagai salah satu cara penanggulangan kemiskinan, peningkatan keadilan sosial dan lainnya.

Untuk mendapatkan pendidikan yang memadai harus ditunjang suatu kemampuan baik itu dari Pemerintah untuk dapat menyediakan sarana yang memadai dan juga tentunya juga harus ditunjang dengan kemampuan masyarakat, karena sampai dengan saat ini kemampuan pemerintah untuk menyediakan pendidikan gratis bagi warganya masih sulit terlaksana.

Masih rendahnya kemampuan pemerintah dan penduduk selalu menjadi kendala dalam dunia pendidikan. Realita ini senantiasa banyak ditemui di sekeliling kita, dimana banyak sarana pendidikan yang sangat tidak layak dan juga banyak anak-anak usia sekolah seharusnya belajar, namun sudah harus bekerja untuk menambah penghasilan keluarga. Ditengah keterbatasan inilah pemerintah

http://sumut.bps.go.id

mencanangkan kebijaksanaan Wajib Belajar Sekolah Dasar enam tahun pada tahun 1984 dan kemudian disusul dengan Wajib Belajar Pendidikan Dasar sembilan tahun mulai tahun 1994. Kebijaksanaan lain sebagai upaya untuk meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat adalah melalui program diluar pendidikan formal salah satunya melalui sekolah-sekolah terbuka.

Program atau kebijaksanaan pemerintah dewasa ini dalam bidang pendidikan pada hakekatnya bertujuan untuk memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dapat sekolah. Dengan demikian diharapkan tingkat pendidikan masyarakat akan lebih baik dan utamanya tingkat melek huruf terutama pada penduduk usia sekolah (7-24 tahun) akan mencapai 100 persen.

4.1. Angka Partisipasi Sekolah

Tingkat partisipasi sekolah merupakan indikator pendidikan yang menggambar persentase penduduk yang masih sekolah menurut kelompok usia sekolah yaitu umur 7-12 tahun dan umur 13-15 tahun sebagai pendidikan dasar, 16-18 tahun pada pendidikan menengah dan usia 19-24 tahun pada pendidikan tinggi. Pada umumnya pada tingkat pendidikan dasar tingkat partisipasi sekolah masih cukup tinggi, namun angka ini akan semakin turun untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

http://sumut.bps.go.id

Grafik 4..1. Perkembangan Tingkat Partisipasi Sekolah Penduduk SUMUT, 2006-2008

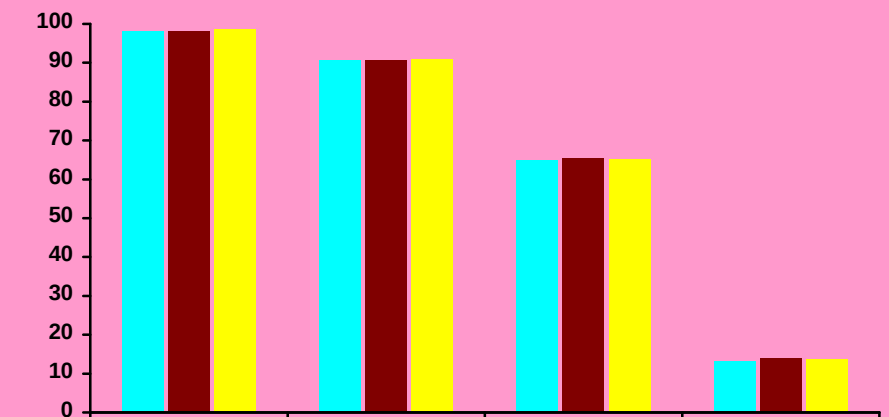

	7-12 tahun	13-15 tahun	16-18 tahun	19-24 tahun
2006	98,19	90,62	65,09	13,22
2007	98,31	90,72	65,5	14,02
2008	98,66	90,89	65,34	13,82

Grafik 4.1. menunjukkan bahwa tingkat partisipasi sekolah penduduk Sumatera Utara terus meningkat. Pada usia 7-12 tahun meningkat dari 98,19 persen tahun 2006 menjadi 98,66 persen pada tahun 2008. Kemudian pada kelompok umur 13-15 meningkat dari 90,62 persen menjadi 90,89 persen pada tahun yang sama. Demikian juga pada kelompok umur 16-18 dan 19-24 tahun, dimana keduanya menunjukkan peningkatan dibanding tahun 2006.

4.2. Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Rendahnya tingkat pendidikan merupakan salah satu penghambat dalam percepatan pembangunan. Dengan demikian, tingkat pendidikan sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Keadaan seperti ini sesuai dengan hakekat pendidikan itu sendiri, yakni merupakan usaha sadar untuk pengembangan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah yang berlangsung seumur hidup.

Berdasarkan data 5 tahun terakhir seperti pada grafik 4.2., tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk dewasa di Sumatera Utara mengalami peningkatan terutama pada tingkat pendidikan SLTA dan Perguruan Tinggi.. Pada tahun 2004 sekitar 23 persen penduduk dewasa di Sumatera berpendidikan SLTA, meningkat menjadi 24,52 persen pada tahun 2008. Kemudian mereka yang berpendidikan minimal DI/DII meningkat dari 3,12 persen pada tahun 2004 menjadi 5,1 persen pada tahun 2008.

http://sumut.bps.go.id

Grafik 4.2. Persentase Penduduk Menurut Pendidikan Tertinggi Ditamatkan, 2004-2008

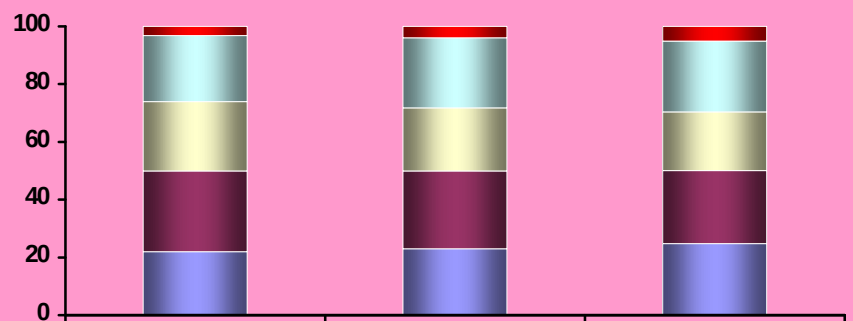

	2004	2006	2008
Diploma/Sarjana	3,12	3,93	5,14
SLTA	22,99	24,3	24,52
SLTP	23,94	21,84	20,22
SD	28,03	26,98	25,40
SD Kebawah	21,92	22,96	24,72

Kondisi tingkat pendidikan menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut, hal yang perlu mendapat perhatian adalah seperti di Kabupaten Nias dan Nias Selatan dimana masih ada sekitar 11,20 persen dan 29,20 persen yang tidak/belum pernah sekolah.Kemudian jika dibandingkan antara wilayah perkotaan dan perdesaan tampak bahwa di perkotaan persentase penduduk yang menamatkan tingkat pendidikan atas jauh lebih tinggi dibanding perdesaan.

Tabel 4.1. Persentase Penduduk 10 Ke Atas menurut Tingkat Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, 2008

Kota/Kabupaten	Tidak/ Belum Pernah Sekolah	Tidak/ Belum Tamat SD	Pendidikan Yang Ditamatkan						
			SD	SLTP	SLTA	SLTA Kej	D1/ D2	D 3	D4/ S1
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
Kabupaten									
1. Nias	11,20	28,09	29,27	16,46	11,33	1,89	0,79	0,41	0,56
2. Mandailing Natal	1,30	24,93	38,89	16,34	12,18	2,80	1,27	0,72	1,58
3. Tapanuli Selatan	1,08	25,07	31,61	22,72	13,04	3,32	0,65	0,78	1,73
4. Tapanuli Tengah	3,29	32,02	22,22	20,61	12,88	4,76	1,22	0,81	2,19
5. Tapanuli Utara	1,95	22,61	25,15	23,30	13,55	9,68	0,55	1,01	2,19
6. Toba Samosir	1,63	19,69	19,92	22,62	19,90	9,45	1,54	1,53	3,73
7. Labuhan Batu	1,98	25,64	30,65	20,83	14,55	4,24	0,60	0,44	1,08
8. Asahan	2,73	26,83	29,28	19,17	13,13	5,69	0,67	0,69	1,80
9. Simalungun	2,80	20,89	26,80	21,88	15,60	8,74	0,56	1,19	1,54
10. Dairi	1,87	24,62	25,91	22,71	14,21	7,45	1,51	0,84	0,88
11. Karo	2,42	22,10	23,69	22,02	18,16	5,42	0,75	2,37	3,06
12. Deli Serdang	1,33	18,06	22,76	21,97	20,41	10,43	0,55	1,17	3,33
13. Langkat	2,69	27,95	30,87	18,09	11,68	5,53	0,52	0,70	1,98
14. Nias Selatan	29,20	29,30	19,32	12,56	8,67	0,29	0,21	0,17	0,29
15. Humb. Hasundutan	2,11	21,26	25,80	25,27	17,32	5,04	0,81	0,79	1,61
16. Pakpak Bharat	2,73	26,52	28,90	21,99	12,63	3,54	1,57	0,83	1,30
17. Samosir	2,81	28,39	22,52	21,76	17,75	3,78	0,79	0,69	1,51
18. Serdang Bedagai	3,00	23,29	28,19	22,28	13,45	7,51	0,60	0,49	1,19
19. Batubara	4,19	31,58	24,90	18,48	11,64	5,28	0,39	0,78	2,76
Kota									
20. Sibolga	0,79	15,17	22,74	22,00	26,77	5,79	0,70	2,20	3,84
21. Tanjung Balai	0,97	24,93	28,45	17,28	18,47	4,90	0,48	1,02	3,49
22. Pematang Siantar	0,45	14,40	18,13	22,52	25,66	8,87	2,19	2,64	5,14
23. Tebing Tinggi	1,54	15,05	22,30	20,60	24,94	8,28	1,19	2,18	3,92
24. Medan	1,51	14,11	17,98	18,73	27,89	8,58	0,82	2,48	7,92
25. Binjai	1,19	15,52	22,23	21,04	22,47	10,05	0,69	1,78	5,04
26. Padangsidimpuan	0,83	18,69	25,09	19,12	21,18	6,85	1,27	1,27	5,71
Sumatera Utara	**2,78**	**21,94**	**25,40**	**20,22**	**17,70**	**6,82**	**0,74**	**1,22**	**3,18**
• **Perkotaan**	**1,37**	**16,97**	**21,19**	**20,55**	**24,06**	**8,86**	**0,93**	**1,91**	**5,53**
• **Pedesaan**	**4,23**	**27,69**	**30,63**	**21,03**	**12,86**	**5,33**	**0,61**	**0,65**	**1,21**

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, BPS Provinsi Sumatera Utara

4.3. Angka Buta Huruf

Ukuran makro yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan adalah kemampuan membaca dan menulis atau kebalikannya (buta huruf) penduduk berumur 10 tahun keatas. Tingkat buta huruf dapat dijadikan sebagai indikator tingkat pendidikan karena diasumsikan bahwa dengan adanya kemampuan membaca dan menulis seseorang dapat mempelajari dan menyerap ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu melek huruf dapat dijadikan ukuran kesejahteraan sosial dan kemajuan suatu bangsa. Karena kemampuan membaca dan menulis yang dimiliki akan dapat mendorong penduduk untuk berperan lebih aktif dalam proses pembangunan.

Data lima tahun terakhir menunjukkan bahwa tingkat buta huruf penduduk Sumatera Utara menunjukkan penurunan, yaitu dari 3,00 persen pada tahun 2004 menjadi 2,64 persen pada tahun 2008. Hal yang cukup menarik diulas adalah tingginya tingkat buta huruf perempuan dibanding laki-laki. Pada tahun 2004 tingkat buta huruf perempuan mencapai 4,23 persen lebih tinggi dibanding laki-laki yang hanya 1,76 persen. Kondisi tahun 2008 tidak berbeda dimana tingkat buta huruf perempuan masih lebih tinggi yaitu 4,02 persen dibanding laki-laki yang sebesar 2,64 persen..

http://sumut.bps.go.id

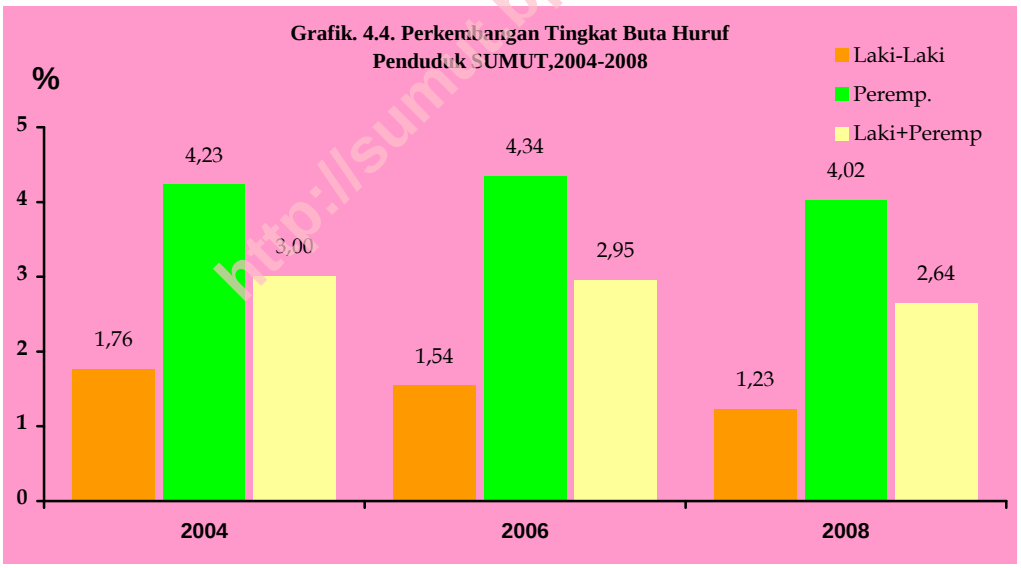

Tabel 4.3 menunjukkan persentase penduduk yang buta huruf menurut kabupaten/kota. Kabupaten Nias Selatan mempunyai persentase penduduk yang buta huruf mencapai angka 22,68 persen. Tingginya angka buta huruf di Kabupaten Nias Selatan disebabkan antara lain sarana transportasi dan komunikasi yang terbatas, baik menuju ke daerah tersebut maupun antar daerah di Nias Selatan. Tabel 4.3 Angka Melek Huruf Penduduk 10 Tahun Ke Atas menurut Kabupaten/Kota, 2008

Tabel 4.2 Tingkat Melek Huruf dan Buta Huruf Menurut Kabupaten/kota dan Jenis Kelamin, 2008

Kota/Kabupaten	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan	
	Melek Huruf	Buta Huruf	Melek Huruf	Buta Huruf	Melek Huruf	Buta Huruf
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
Kabupaten						
1. Nias	92,48	7,52	81,99	18,01	87,06	12,94
2. Mandailing Natal	99,43	0,57	98,81	1,19	99,10	0,90
3. Tapanuli Selatan	99,82	0,18	99,24	0,76	99,52	0,48
4. Tapanuli Tengah	98,14	1,86	94,34	5,66	96,22	3,78
5. Tapanuli Utara	99,43	0,57	96,89	3,11	98,13	1,87
6. Toba Samosir	99,58	0,42	97,27	2,73	98,38	1,62
7. Labuhan Batu	99,29	0,71	97,41	2,59	98,37	1,63
8. Asahan	98,54	1,46	95,56	4,44	97,05	2,95
9. Simalungun	99,03	0,97	95,83	4,17	97,41	2,59
10. Dairi	99,36	0,64	96,44	3,56	97,85	2,15
11. Karo	99,77	0,23	97,16	2,84	98,44	1,56
12. Deli Serdang	99,16	0,84	97,44	2,56	98,30	1,70
13. Langkat	99,01	0,99	95,01	4,99	97,00	3,00
14. Nias Selatan	86,48	13,52	68,36	31,64	77,32	22,68
15. Humb.Hasundutan	99,53	0,47	96,98	3,02	98,22	1,78
16. Pakpak Bharat	98,68	1,32	95,44	4,56	97,12	2,88
17. Samosir	98,89	1,11	94,59	5,41	96,76	3,24
18. Serdang Bedagai	99,19	0,81	95,46	4,54	97,27	2,73
19. Batubara	97,46	2,54	92,22	7,78	94,75	5,25
Kota						
20. Sibolga	99,61	0,39	98,58	1,42	99,11	0,89
21. Tanjung Balai	99,02	0,98	98,08	1,92	98,55	1,45
22. Pematang Siantar	99,89	0,11	98,75	1,25	99,30	0,70
23. Tebing Tinggi	99,59	0,41	97,58	2,42	98,56	1,44
24. Medan	99,57	0,43	98,51	1,49	99,03	0,97
25. Binjai	99,41	0,59	98,73	1,27	99,07	0,93
26. P. Sidimpuan	99,74	0,26	99,39	0,61	99,56	0,44
Sumatera Utara	**98,77**	**1,23**	**95,98**	**4,02**	**97,36**	**2,64**
• **Perkotaan**	**99,41**	**0,59**	**98,05**	**1,95**	**98,72**	**1,28**
• **Pedesaan**	**98,20**	**1,80**	**94,16**	**5,84**	**96,15**	**3,85**

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, BPS Provinsi Sumatera Utara

http://sumut.bps.go.id

BAB V
KESEHATAN

Berdasarkan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan salah satu hak dasar rakyat adalah mendapat pelayanan kesehatan. Seperti halnya dengan pendidikan, kesehatan harus dipandang sebagai investasi di masa mendatang dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Dengan adanya upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik. Bangsa yang memiliki tingkat derajat kesehatan yang tinggi akan lebih berhasil dalam melaksanakan pembangunan.

Upaya perbaikan kesehatan masyarakat dikembangkan melalui Sistem Kesehatan Nasional. Pelaksanaannya diusahakan dengan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat yang diarahkan terutama kepada golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Selain itu upaya pencegahan dan penyembuhan penyakit serta peningkatan pembangunan pusat-pusat kesehatan masyarakat serta sarana penunjangnya terus dilakukan oleh Pemerintah, seperti puskesmas, posyandu, pos obat desa, pondok bersalin desa serta penye-diaan fasilitas air bersih. Oleh karena itu, pembangunan yang sedang digiatkan pemerintah diharapkan dapat berakselerasi positif.

Faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat diantaranya adalah kurangnya sarana pelayanan kesehatan, keadaan sanitasi dan lingkungan yang tidak memadai, dan rendahnya konsumsi makanan bergizi. Tetapi faktor terpenting dalam upaya peningkatan kesehatan ada pada manusianya sebagai subyek dan sekaligus obyek dari upaya tersebut.

http://sumut.bps.go.id

5.1. Angka Kesakitan (Morbidity Rate)

Tingkat kesakitan/morbiditas didefinisikan sebagai persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-harinya dalam sebulan yang lalu. Tingkat kesakitan ini selain secara umum dapat dilihat juga jenis keluhan menurut jenis penyakit.

Berdasarkan data 2004 s/d 2008, tingkat morbiditas di Sumatera Utara menunjukkan pola yang naik. Pada tahun 2004 sebanyak 19,19 persen penduduk Sumatera Utara mengalami keluhan kesehatan selama satu bulan yang lalu. Pada tahun 2006 s/d 2008 naik menjadi masing-masing 21,17 persen dan 25,29 persen.. Jika dilihat menurut jenis kelamin dapat dikatakan bahwa laki-laki lebih banyak menderita keluhan kesehatan, hal ini terlihat dari persentase wanita yang mengalami keluhan kesehatan sebesar 25,46 persen dan pria 25,92 persen pada tahun 2008.

http://sumut.bps.go.id

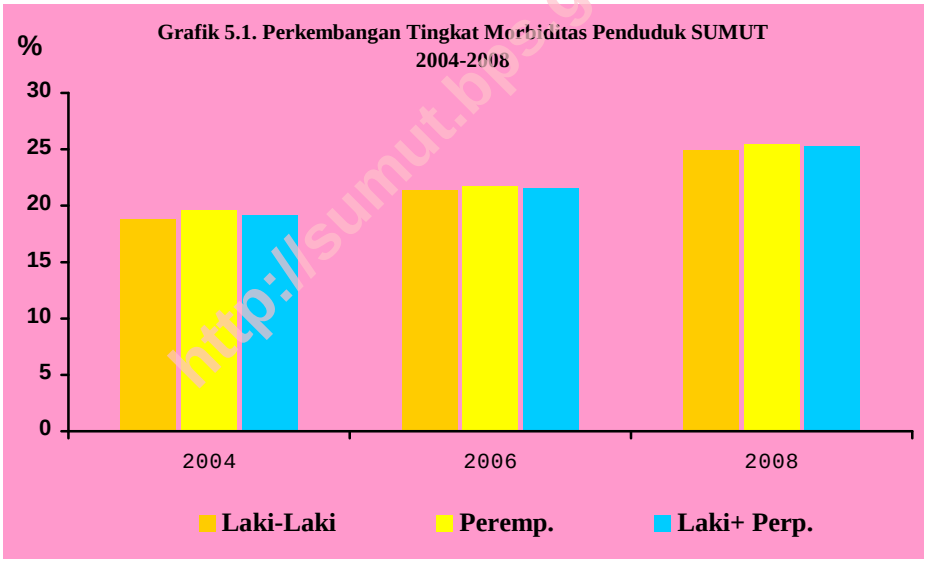

Grafik 5.1 menunjukkan persentase penduduk yang mengobati sendiri selama sebulan yang lalu. Angka persentase yang dihasilkan pada Susenas merupakan hasil pengolahan dari pertanyaan kepada responden tentang pengobatan sendiri. Dari jawaban responden yang melakukan pengobatan sendiri dengan cara memakai obat tradisional yang menjawab "Ya" sebanyak 20,56 persen dan sisanya menjawab "Tidak", dengan cara memakai obat modern yang menjawab "Ya" sebanyak 88,64 persen dan sisanya menjawab "Tidak" dan dengan cara lainnya yang menjawab "Ya" sebanyak 5,12 persen dan selebihnya menjawab "Tidak". Persentase jawaban responden yang menjawab "Ya" dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

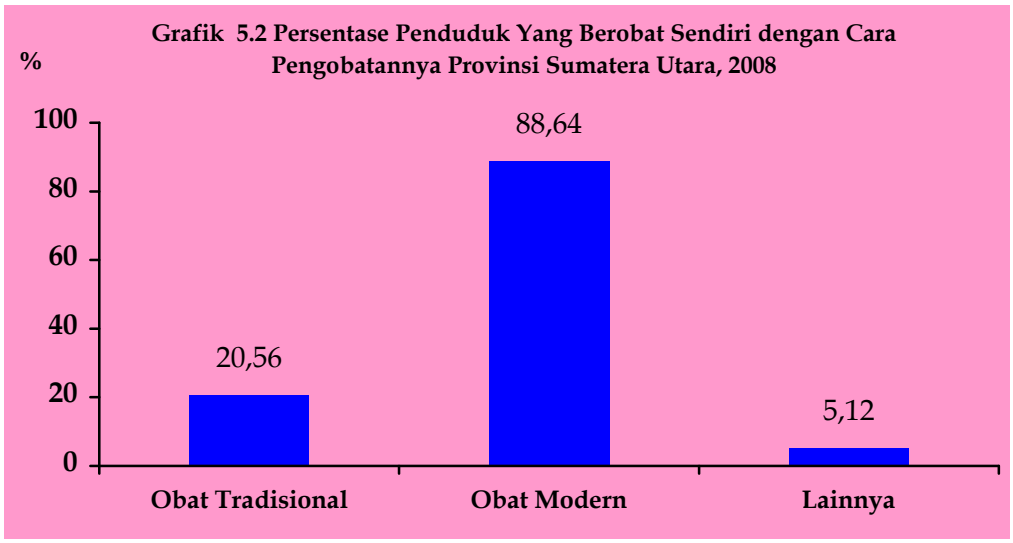

5.2. Penolong Kelahiran

Kesehatan balita selain dipengaruhi oleh kesehatan ibu, dapat juga dipengaruhi oleh faktor lain, diantaranya adalah penolong kelahiran. Data komposisi penolong kelahiran bayi dapat dijadikan salah satu indikator kesehatan terutama dalam hubungannya dengan tingkat kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan secara umum.

Dilihat dari kesehatan ibu dan anak, persalinan yang ditolong oleh tenaga medis seperti dokter dan bidan dapat dianggap lebih baik dan aman jika dibanding ditolong oleh bukan tenaga media seperti dukun, famili atau lainnya. Penanganan kelahiran bayi yang kurang baik dapat membahayakan kondisi ibu dan bayi yang dilahirkan seperti pendarahan, kejang-kejang atau situasi yang lebih berbahaya dapat mengakibatkan kematian pada bayi atau si ibu.

http://sumut.bps.go.id

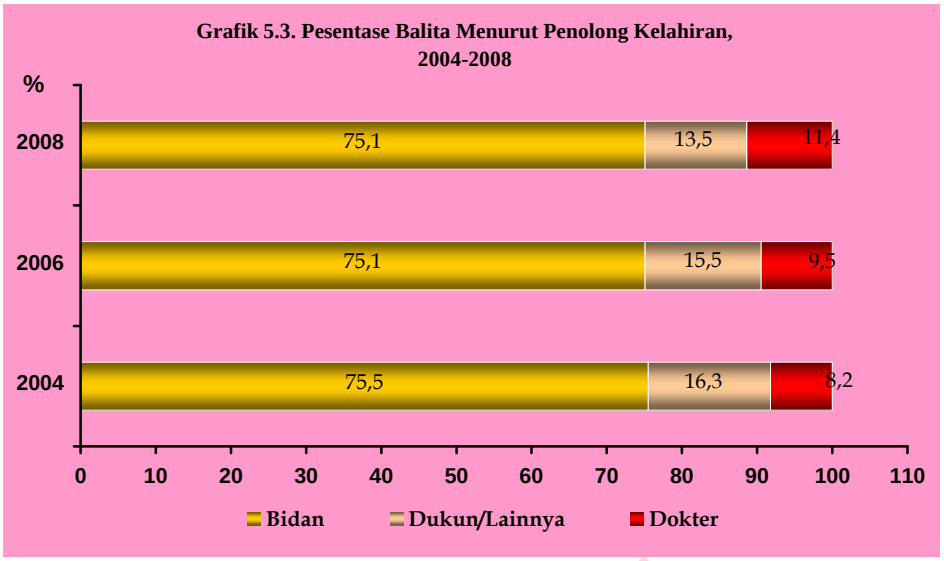

http://sumut.bps.go.id

Pada tahun 2004 s/d 2008 penolong kelahiran balita di Sumatera Utara pada umumnya adalah bidan. Tahun 2004 s/d 2008 sekitar 75 persen kelahiran ditolong oleh bidan. Tingginya penolong kelahiran oleh bidan sangat mungkin disebabkan tingkat kepercayaan terhadap bidan sangat tinggi.Tenaga penolong kelahiran lainnya yang cukup tinggi adalah dukun. Pada tahun 2008 sebanyak 13,5 persen kelahiran ditolong dukun, angka ini lebih rendah dibanding tahun 2004 yang mencapai 16,3 persen.

Masih besarnya peranan dukun dalam membantu kelahiran balita perlu terus mendapat perhatian. Usaha yang mungkin dapat dilakukan adalah menambah kekurangan tenaga medis secara merata di daerah-daerah tertentu di Sumatera Utara serta meningkatkan kemampuan dan keterampilan dukun bayi agar mengerti tata cara menolong kelahiran yang aman dan sehat. Karena tidak tertutup kemungkinan bahwa didaerah tertentu masyarakat dengan alasan ekonomi dan pendidikan masih cenderung percaya kepada dukun dibandingkan dengan tenaga medis.

Tenaga penolong kelahiran oleh dokter belum mempunyai peran yang besar, karena biasanya hanya pada kasus tertentu saja proses kelahiran ditolong oleh dokter yaitu jika bidan sudah merasa tidak mampu lagi karena terjadi masalah. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2004 hanya 8,2 persen, meningkat menjadi 11,4 persen pada tahun 2008.

5.3. Angka Kematian bayi

Angka Kematian Bayi (*Infant Mortality Rate*/IMR) dapat menggam-barkan tingkat kesehatan penduduk secara umum. Angka ini biasanya diperkirakan melalui cara atau metode tertentu dari data hasil sensus/survei. Kematian bayi berkaitan erat dengan tingkat pendidikan keluarga, keadaan sosial ekonomi keluarga, sistem nilai adat istiadat, kebersihan dan kese-hatan lingkungan serta pelayanan kesehatan yang tersedia. Sehubungan dengan itu upaya pembangunan kesehatan dimasa mendatang perlu terus ditingkatkan. Dengan pembangunan yang dilaksanakan tersebut, baik pembangunan sarana kesehatan maupun perbaikan tingkat hidup penduduk juga akan menyebabkan penurunan tingkat kematian.

Angka Kematian Bayi (*Infant Mortality Rate*/IMR) di Sumatera Utara selama periode 1999-2008 mengalami penurunan. Pada tahun 1999, IMR diperkirakan sebesar 43,0 dan terus menurun menjadi 41,0 pada tahun 2000. Pada tahun 2008 menurun lagi menjadi 26,9 dan tahun 2008 kembali turun menjadi 25,6.

http://sumut.bps.go.id

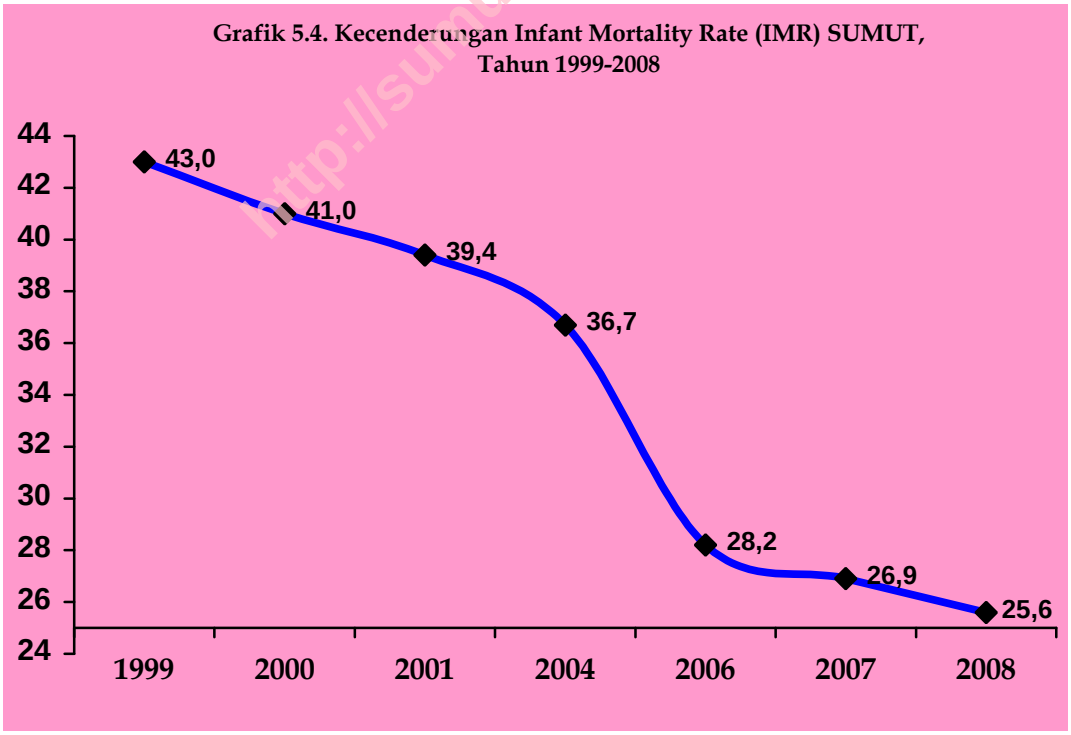

5.4. Angka Harapan Hidup

Secara umum, tingkat kesehatan penduduk suatu wilayah juga dapat dinilai dengan melihat Angka Harapan Hidup (AHH) penduduknya. Angka ini sekaligus memperlihatkan keadaan dan sistem pelayanan kesehatan yang ada dalam suatu masyarakat, karena dapat dipandang sebagai suatu bentuk akhir dari hasil upaya peningkatan taraf kesehatan secara keseluruhan. Kebijaksanaan peningkatan kesehatan antara lain bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membiasakan diri untuk hidup sehat, sehingga sangat membantu memperpanjang angka harapan hidup penduduk. Di samping itu, adanya peningkatan taraf sosial ekonomi masyarakat memungkinkan penduduk untuk memperoleh perawatan kesehatan yang lebih baik sehingga dapat memperpanjang usia. Sejalan dengan penurunan IMR, maka AHH menunjukkan pening-katan (Grafik 5.5).

http://sumut.bps.go.id

Grafik.5.5. Kecenderungan Angka Harapan Hidup SUMUT, 1999-2008

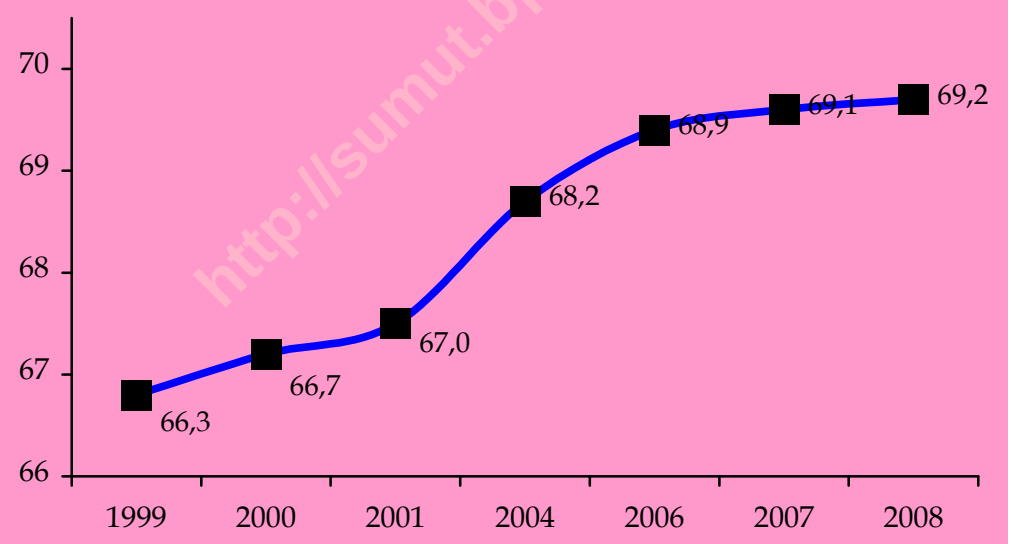

Kecenderungan meningkatnya angka harapan hidup ini disebabkan membaiknya pelayanan kesehatan dan peningkatan kondisi sosial ekonomi, sehingga memungkinkan terjadinya perbaikan gizi serta kesehatan dan lingkungan hidup yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan angka harapan hidup.

BAB VI
FERTILITAS DAN KELUARGA BERENCANA

Salah satu komponen utama kependudukan yang menyebabkan terjadinya perubahan penduduk adalah fertilitas. Fertilitas menyangkut banyaknya anak lahir hidup yang dilahirkan oleh wanita atau sekelompok wanita. Banyaknya anak yang dilahirkan sangat erat kaitannya terhadap beban rumahtangga. Semakin banyak jumlah anak, berarti semakin besar tanggungan kepala rumahtangga dalam memenuhi kebutuhan anggota rumahtangganya. Bagi rumah tangga dengan kondisi ekonomi yang lemah, maka pembatasan jumlah anak merupakan salah satu cara bagi tercapainya keluarga yang sejahtera. Dalam upaya melakukan pembatasan jumlah anak yang akan dilahirkan, maka penduduk wanita pada usia tertentu menjadi sasarannya yaitu usia antara 15-49 tahun. Hal ini disebabkan kemungkinan wanita melahirkan pada usia tersebut anak cukup besar.

Selanjutnya usia wanita saat perkawinan pertama selain mempengaruhi fertilitas juga mempunyai resiko dalam melahirkan. Semakin muda usia saat perkawinan pertama, semakin besar resiko yang dihadapi bagi keselamatan ibu maupun anak karena belum matangnya rahim wanita muda untuk memproduksi anak, atau karena belum siapnya mental menghadapi masa kehamilan/kelahiran. Demikian pula sebaliknya, semakin tua usia saat perkawinan pertama, semakin tinggi resiko yang dihadapi dalam masa kehamilan/melahirkan.

http://sumut.bps.go.id

6.1. Usia Perkawinan Pertama

Usia perkawinan pertama mempunyai pengaruh cukup besar terhadap fertilitas yang merupakan salah satu komponen pertumbuhan penduduk. Pada dasarnya ada dua macam bentuk perkawinan, pertama yang menunjukkan perubahan status dari belum kawin menjadi berstatus kawin. Kedua, perubahan dari status cerai menjadi status kawin. Dalam kaitan dengan sub bagian ini, defenisi yang digunakan adalah yang pertama, yaitu perubahan dari status belum kawin menjadi kawin.

Wanita berumur 10 tahun ke atas yang melangsungkan perka-winan, akan melalui suatu proses biologis, yaitu melahirkan berulang kali sampai dengan masa menopause. Oleh karena itu, umur perkawinan pertama dianggap mempengaruhi panjangnya masa reproduksi. Semakin muda seorang wanita menikah, maka semakin panjang usia repro-duksinya dan semakin besar pula kemungkinannya mempunyai anak.

Tabel 6.1 menampilkan persentase wanita 10 tahun ke atas yang pernah kawin menurut umur perkawinan pertama. Secara umum, sebagian besar (modus) usia saat perkawinan pertama adalah 19-24 tahun (53,28 persen). Persentase wanita pernah kawin yang usia perkawinan pertamanya kurang dari 17 tahun lebih sedikit yaitu 9,57 persen.

Tabel 6.1. Persentase Wanita Berusia 10 Tahun Ke Atas Yang Pernah Kawin menurut Umur Perkawinan Pertama Provinsi Sumatera Utara, 2008

Usia Perkawinan Pertama	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan + Pedesaan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
10 – 16	7,28	11,51	9,57
17 – 18	15,04	21,66	18,62
19 – 24	53,82	52,83	53,28
25 – 34	22,67	13,33	17,61
35 +	1,19	0,68	0,91

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, BPS Provinsi Sumatera Utara

http://sumut.bps.go.id

Ditinjau dari daerah perkotaan dan perdesaan, terlihat bahwa perkawinan dalam usia muda lebih banyak terjadi di daerah perdesaan dibandingkan di daerah perkotaan. Menurut daerah kabupaten/kota, persentase wanita yang pernah kawin pada usia muda (kurang dari 17 tahun) cukup bervariasi, dengan persentase terendah di Kabupaten Humbang Hasundutan (2,96 persen) dan yang tertinggi di Kabupaten Nias Selatan (8,03 persen). Usia perkawinan di bawah usia 17 tahun menurut daerah kabupaten/kota ditampilkan pada grafik 6.1. Untuk daerah kota, persentase wanita dengan usia kawin pertama di bawah 17 tahun tertinggi adalah Kota Tanjung Balai (13,28 persen) dan terendah berada di Kota Pematang Siantar (3,29 persen).

Grafik 6.1.Persentase Wanita Usia Kawin Pertama di bawah 17 Tahun menurut Kabupaten/Kota, 2008

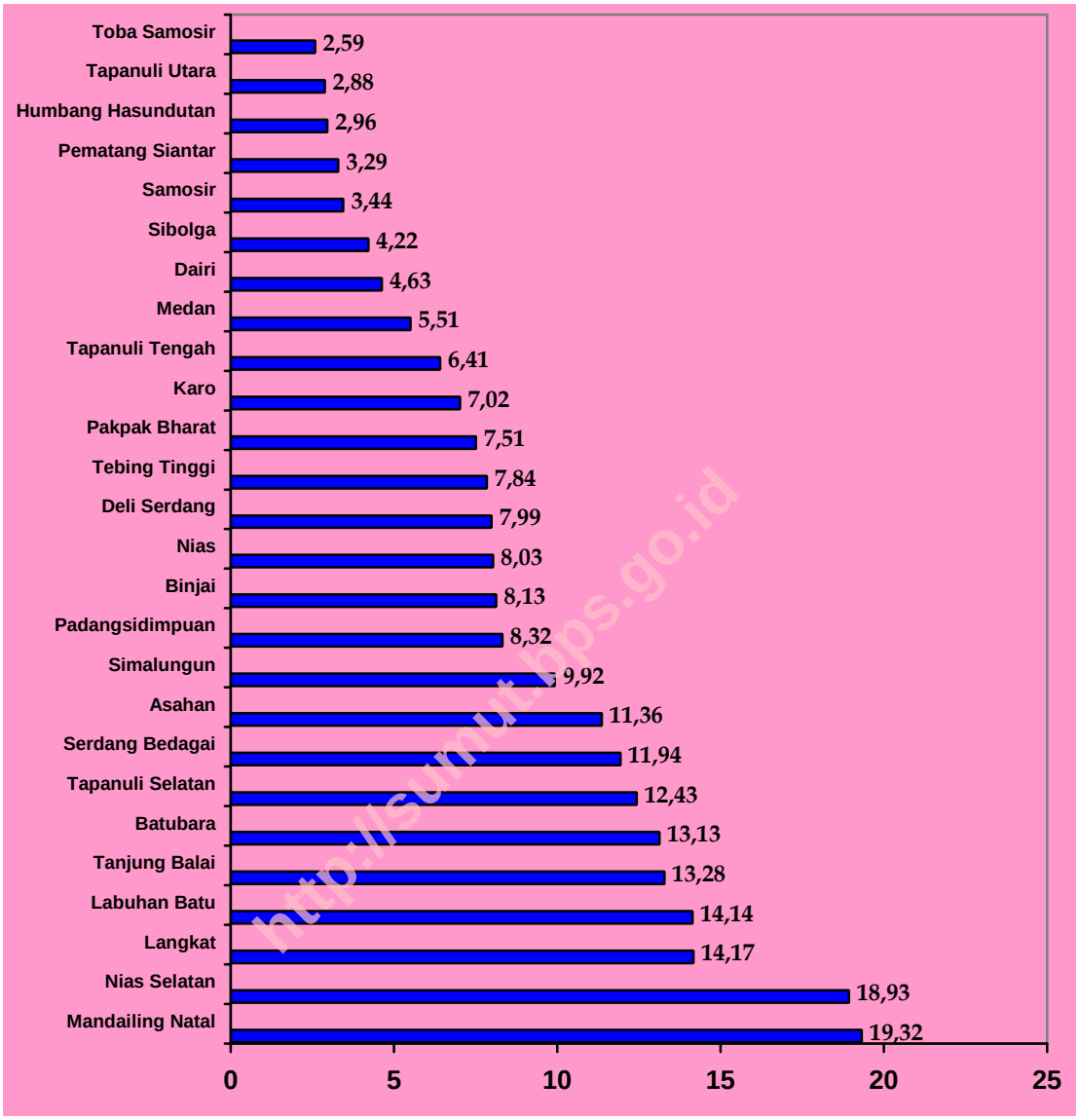

6.1. Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate*/ TFR)

Salah satu komponen utama kependudukan yang menyebabkan perubahan jumlah penduduk adalah fertilitas. Fertilitas menyangkut banyaknya bayi atau anak lahir hidup yang dilahirkan oleh wanita atau sekelompok wanita. Banyaknya anak yang dilahirkan akan membawa konsekuensi terhadap kesejahteraan rumahtangga. Semakin banyak jumlah anak, berarti semakin besar tanggungan kepala rumahtangga dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritual anggota rumahtangganya. Bagi rumah tangga terutama dengan kondisi ekonomi

yang lemah, maka pembatasan jumlah anak merupakan salah satu cara bagi tercapainya keluarga yang sejahtera.

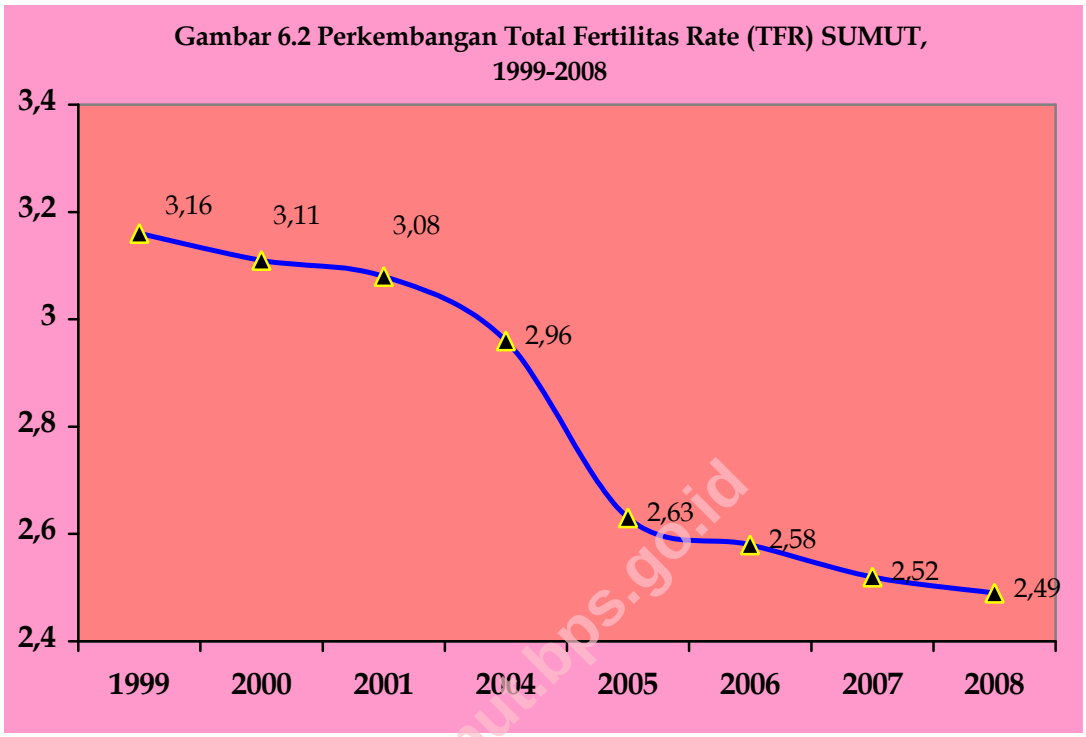

http://sumut.bps.go.id

Angka TFR pada tahun 1999 sebesar 3,16 kemudian turun menjadi 2,63 pada tahun 2005. Pada tahun 2008 turun kembali menjadi sebesar 2,49. Salah satu faktor yang cukup berpengaruh terhadap tingginya tingkat kelahiran adalah usia perkawinan pertama terutama wanita, karena semakin muda seorang wanita menikah maka kemungkinan waktu untuk melahirkan semakin panjang. Selain itu usia perkawinan juga berpengaruh terhadap stabilitas suatu keluarga, terhadap kesehatan diri sendiri, dan terhadap anak yang dilahirkan. Semakin muda usia saat perkawinan pertama, semakin besar resiko yang dihadapi bagi keselamatan ibu maupun anak karena belum siapnya fisik dan mental menghadapi masa kehamilan/kelahiran. Demikian pula sebaliknya, semakin tua usia saat perkawinan pertama *(melebihi usia yang dianjurkan dalam program KB),* semakin tinggi resiko yang dihadapi dalam masa kehamilan/melahirkan

6.2. Keluarga Berencana

Penurunan tingkat fertilitas di Provinsi Sumatra Utara telah berlangsung cukup lama, namun yang menarik untuk dibahas adalah perubahan yang terjadi setelah dimulainya program keluarga berencana nasional. Penurunan tersebut masih akan terus berlangsung tetapi dengan percepatan yang semakin melambat. Pengalaman menunjukkan bahwa penurunan tingkat fertilitas dipengaruhi oleh meningkatnya faktor sosial ekonomi masyarakat. Oleh karenanya, selain dikarenakan program KB, penurunan fertilitas juga disebabkan oleh semakin tingginya tingkat pendidikan yang dicapai yang nantinya akan mempengaruhi umur pada saat perkawinan pertama.

Pasangan suami isteri yang hidup bersama dengan usia isterinya antara 15-49 tahun merupakan sasaran dari program KB. Hal ini disebabkan pada usia tersebut seorang wanita sedang berada pada kemungkinan terbesar untuk melahirkan, sehingga untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditargetkan, perlu dilihat tentang alat/cara kontrasepsi yang digunakan para akseptor.

Persentase wanita berumur 15-49 tahun dan berstatus kawin, yang pernah menggunakan/memakai alat/cara KB pada tahun 2007 sebesar 64,46 persen, dengan rincian 67,31 persen di perkotaan dan 61,95 persen di perdesaan. Persentase wanita yang pernah ikut KB di kabupaten/kota tersebut sangat bervariasi. Di Kabupaten Binjai sudah cukup tinggi yakni 79,41 persen, sedangkan di Kabupaten Nias Selatan sangat rendah, yaitu hanya sebesar 31,10 persen. Persentase wanita usia 15-49 tahun berstatus kawin yang sedang menggunakan/memakai alat/cara KB adalah sebesar 45,53 persen.

http://sumut.bps.go.id

Tabel 6.2. Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun Berstatus Kawin yang Pernah dan Sedang Menggunakan Alat/Cara KB menurut Kabupaten/Kota, 2008

Kabupaten/Kota	Memakai Alat KB			
	Sedang Mengunakan	Tidak Menggunakan Lagi	Tdk Pernah Mengunakan	Jumlah
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
Kabupaten				
1. Nias	23,58	16,45	59,97	100,00
2. Mandailing Natal	18,25	17,56	64,19	100,00
3. Tapanuli Selatan	26,61	20,18	53,21	100,00
4. Tapanuli Tengah	27,21	21,77	51,02	100,00
5. Tapanuli Utara	22,47	24,13	53,40	100,00
6. Toba Samosir	26,28	19,77	53,96	100,00
7. Labuhan Batu	42,04	23,66	34,30	100,00
8. Asahan	50,96	24,43	24,60	100,00
9. Simalungun	54,42	21,41	24,16	100,00
10. Dairi	33,49	20,80	45,71	100,00
11. Karo	45,21	23,35	31,44	100,00
12. Deli Serdang	51,85	23,97	24,17	100,00
13. Langkat	51,45	22,27	26,29	100,00
14. Nias Selatan	24,20	6,90	68,90	100,00
15. Humbang Hasundutan	18,45	22,93	58,62	100,00
16. Pakpak Bharat	29,51	19,80	50,69	100,00
17. Samosir	13,61	18,10	68,29	100,00
18. Serdang Bedagai	53,52	20,46	26,02	100,00
19. Batu Bara	51,11	17,16	31,72	100,00
Kota				
20. Sibolga	44,70	27,53	27,76	100,00
21. Tanjung Balai	40,28	24,12	35,60	100,00
22. Pematang Siantar	35,37	25,05	39,57	100,00
23. Tebing Tinggi	43,75	22,50	33,75	100,00
24. Medan	36,07	26,34	37,58	100,00
25. Binjai	56,17	23,24	20,59	100,00
26. Padangsidimpuan	35,19	28,50	36,31	100,00
Sumatera Utara	**41,91**	**22,55**	**35,54**	**100,00**
• **Perkotaan**	**42,74**	**24,57**	**32,69**	**100,00**
• **Pedesaan**	**41,18**	**20,77**	**38,05**	**100,00**

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, BPS Provinsi Sumatera Utara

http://sumut.bps.go.id

Dari persentase wanita usia 15-49 tahun yang sedang menggunakan/memakai alat/cara KB tersebut diantaranya menggunakan alat/cara suntik (47,59 persen), pil KB (31,98 persen) dan IUD/AKDR (5,07 persen). Tingginya persentase pemakaian alat/cara suntik secara keseluruhan, disebabkan karena alat/cara tersebut sangat disukai.

Tabel 6.3. Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin menurut Kabupaten/Kota dan Alat/Cara KB Yang Digunakan Provinsi Sumatera Utara, 2008

Kabupaten/Kota	MOW	MOP	IUD/ AKDR/ Spiral	Suntik	Susuk KB	Pil KB	Kon-dom	Alat Modern Lainnya	Tradisional
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
Kabupaten									
1. Nias	0,78	3,64	7,01	68,45	13,84	4,71	0,00	0,78	0,78
2. Mandailing Natal	2,58	0,00	1,29	72,96	2,57	14,16	5,15	0,00	1,29
3. Tapanuli Selatan	0,00	0,80	3,99	63,12	9,56	20,14	1,59	0,00	0,80
4. Tapanuli Tengah	4,84	0,00	2,88	50,01	15,21	17,74	5,75	0,00	3,57
5. Tapanuli Utara	16,79	4,80	10,70	41,97	10,17	7,23	1,74	0,00	6,58
6. Toba Samosir	7,94	2,00	1,99	64,66	12,43	7,74	1,25	0,00	1,99
7. Labuhan Batu	5,47	0,00	1,23	58,01	0,82	27,57	0,95	0,00	5,95
8. Asahan	4,96	0,43	2,66	43,77	2,74	41,59	1,92	0,00	1,92
9. Simalungun	14,84	1,70	4,69	50,22	4,59	18,87	2,06	0,49	2,53
10. Dairi	27,14	2,35	2,35	35,21	15,20	8,10	0,00	0,00	9,66
11. Karo	6,02	1,74	5,12	58,04	5,71	20,09	0,00	1,64	1,65
12. Deli Serdang	1,54	0,57	5,26	47,97	3,97	37,09	1,13	0,00	2,47
13. Langkat	2,11	0,34	3,05	37,53	2,37	49,79	1,44	0,34	3,03
14. Nias Selatan	9,10	1,52	6,07	67,42	6,07	6,81	0,00	0,00	3,01
15. Humbang Hasundutan	2,98	1,49	13,12	64,32	9,03	6,05	0,00	0,00	3,01
16. Pakpak Bharat	11,40	1,25	2,55	58,13	16,45	5,17	0,00	0,00	5,05
17. Samosir	6,45	0,00	6,55	59,38	19,08	8,54	0,00	0,00	0,00
18. Serdang Bedagai	2,49	1,28	4,73	53,22	1,69	35,22	0,00	0,40	0,96
19. Batubara	7,49	2,17	3,62	39,12	0,97	42,30	1,45	0,48	2,41
Kota									
20. Sibolga	5,36	1,06	7,52	43,34	21,35	16,57	1,60	0,54	2,67
21. Tanjung Balai	3,35	0,56	1,69	40,73	3,34	44,77	3,91	0,00	1,67
22. Pematang Siantar	12,41	0,00	12,41	46,70	6,57	13,14	3,65	0,00	5,12
23. Tebing Tinggi	5,30	0,54	2,11	44,43	4,76	38,11	0,53	0,00	4,22
24. Medan	6,22	0,42	9,54	39,83	4,57	33,61	1,25	0,41	4,15
25. Binjai	5,02	0,84	9,21	28,36	4,60	48,68	1,67	0,42	1,21
26. Padangsidimpuan	3,83	0,67	6,96	53,75	6,50	18,65	4,03	0,00	5,61
Sumatera Utara	**5,41**	**0,84**	**5,07**	**47,59**	**4,46**	**31,98**	**1,39**	**0,26**	**3,01**
• **Perkotaan**	**4,71**	**0,96**	**6,71**	**43,11**	**4,17**	**34,30**	**2,07**	**0,24**	**3,74**
• **Pedesaan**	**6,04**	**0,74**	**3,57**	**51,68**	**4,72**	**29,86**	**0,76**	**0,28**	**2,34**

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, BPS Provinsi Sumatera Utara

http://sumut.bps.go.id

BAB VII
KEMISKINAN, POLA KONSUMSI, IPM

7.1. Kemiskinan

Secara ekonomi kemiskinan merupakan suatu kondisi kehidupan serba kekurangan yang dialami seseorang sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal hidupnya. Kemiskinan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan satu sama lain yaitu : tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, kondisi geografis dan lainnya. Selanjutnya standar kehidupan ini berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya, tergantung kebiasaan/adat, fasilitas transportasi dan distribusi serta letak geografisnya.

Kebutuhan minimal tersebut meliputi kebutuhan untuk makanan terutama energi kalori sehingga memungkinkan seseorang bisa bekerja untuk memperoleh pendapatan serta kebutuhan non-makanan yang minimal harus dipenuhi. Penentuan batas kemiskinan yang dilakukan oleh BPS mengacu pada kebutuhan minimal yang setara dengan kebutuhan energi sebesar 2.100 kalori perkapita perhari ditambah dengan kebutuhan minimun non makanan. Patokan 2.100 kalori ditentukan berdasarkan hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi yang menyatakan hidup sehat rata-rata setiap orang harus mengkonsumsi makanan setara 2.100 kalori perkapita perhari.

Berdasarkan hasil Susenas, persentase penduduk miskin di Sumatera Utara masih menunjukkan kecenderungan penurunan. Pada tahun 1999 persentase penduduk miskin di Sumatera Utara tercatat sekitar 16,74 persen kemudian turun menjadi 15,89 persen pada tahun 2003.Angka ini kembali turun menjadi 13,90 persen pada tahun 2007 dan 12,55 persen pada tahun 2008.

http://sumut.bps.go.id

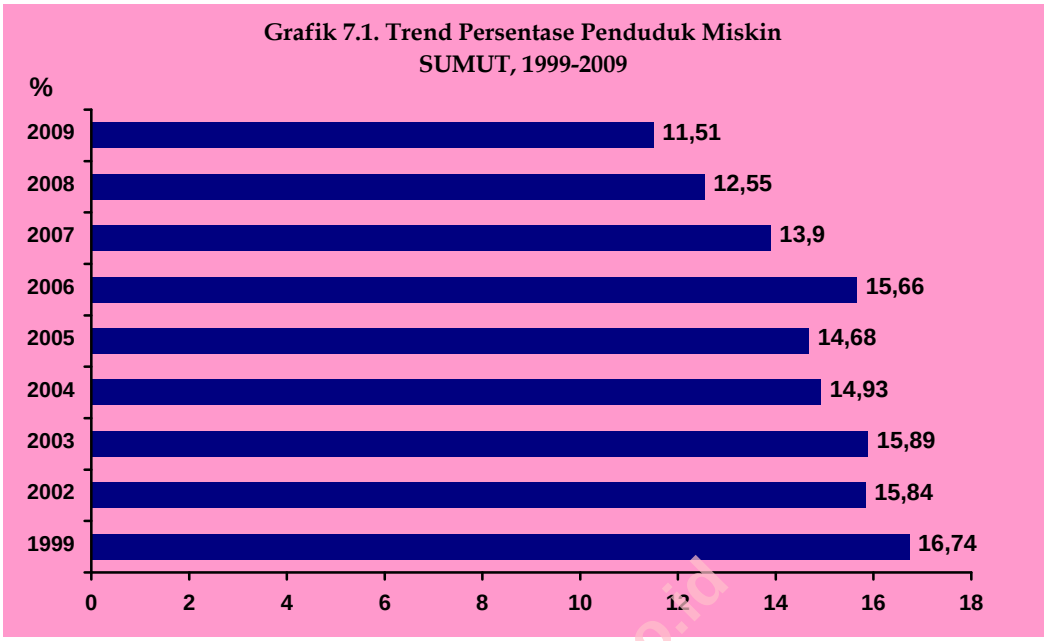

http://sumut.bps.go.id

7.2. Pola Konsumsi

7.2.1. Pengeluaran Rata-rata per Kapita

Tingkat kesejahteraan rumah tangga secara nyata dapat diukur dari tingkat pendapatan yang dibandingkan dengan kebutuhan minimum untuk hidup layak. Perubahan pada tingkat kesejahteraan dilakukan dengan melihat pola pengeluaran rumah tangga yang dilihat berdasarkan pengeluaran. Pengeluaran rumah tangga dibedakan menjadi dua yaitu pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Di negara berkembang umumnya pengeluaran untuk makanan masih merupakan bagian terbesar dari total pengeluaran konsumsi rumah tangga. Sebaliknya di daerah yang relatif sudah maju, pengeluaran untuk aneka barang dan jasa seperti untuk perawatan kesehatan, pendidikan, rekreasi, olahraga, dan sejenisnya merupakan bagian terbesar dari total pengeluaran rumahtangga. Perubahan angka persentase tersebut dalam setiap tahunnya dapat menunjukkan perkembangan taraf kehidupan rumah tangga.

BPS melalui kegiatan Survei Sosial Ekonomi Nasionalnya pada tahun 2008 salah satunya adalah berusaha untuk mendapatkan keterangan/data mengenai keadaan sosial ekonomi/ atau tingkat kesejahteraan yang dilihat dari pola pengeluaran rumahtangga pada rumahtangga yang ada di seluruh kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara selama tahun 2008. Berdasarkan hal tersebut, berikut ini disajikan beberapa indikator yang diharapkan dapat digunakan sebagai gambaran untuk melihat seberapa jauh tingkat kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara pada tahun 2008.

Berdasarkan data Susenas, pengeluaran rata-rata per kapita sebulan penduduk Sumatera Utara semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pengeluaran per kapita pada tahun 2007 sebesar Rp.495.265,- yang terdiri dari pengeluaran untuk makanan sebesar Rp.273.858,- dan Rp.221.407,- untuk pengeluaran bukan makanan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengeluaran diperuntukan untuk konsumsi makanan, berarti sebagian besar dari penduduk masih memprioritaskan pemenuhan untuk kebutuhan primer (makanan).

Tabel 7.1. Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Untuk Makanan dan Bukan Makanan Provinsi Sumatera Utara, 1995-2008

Tahun	Makanan		Bukan Makanan		Jumlah	
	Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1995	32.003	66,76	15.932	33,24	47.935	100,00
1996	37.498	66,03	19.291	33,97	56.789	100,00
1997	38.987	65,54	20.499	34,46	59.486	100,00
1998	50.151	68,35	23.223	31,65	73.374	100,00
1999	86.804	72,78	32.465	27,22	119.269	100,00
2000	91.874	72,15	35.465	27,85	127.339	100,00
2001	102.089	70,46	42.809	29,54	144.898	100,00
2002	122.024	68,15	57.018	31,85	179.042	100,00
2003	134.681	67,85	198.497	32,15	198.497	100,00
2004	136.526	64,22	76.059	35,78	212.585	100,00
2005	168.655	60,20	121.933	39,80	287.480	100,00
2006	185.207	58,60	130.862	41,40	316.070	100,00
2007	204.914	60,20	135.473	39,80	340.387	100,00
2008	273.858	55,30	221.407	44,70	495.265	100,00

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, BPS Provinsi Sumatera Utara

http://sumut.bps.go.id

Bila dilihat dari tipe daerah, persentase pengeluaran per kapita untuk makanan di daerah perdesaan cenderung lebih besar dibandingkan dengan daerah perkotaan, yaitu 61,82 persen untuk daerah perdesaan dan 50,25 persen untuk daerah perkotaan.

Keadaan ini menunjukkan bahwa penduduk di daerah perdesaan masih cenderung menggunakan pendapatan rumah tangganya untuk keperluan konsumsi makanan. Sedangkan di daerah perkotaan, porsi untuk konsumsi makanan sudah mulai dialihkan kepada keperluan lain di luar konsumsi makanan. Ini merupakan salah satu indikator bahwa kesejahteraan masyarakat di daerah perkotaan lebih baik dibanding di perdesaan.

Tabel 7.2. Distribusi Pengeluaran Makanan dan Bukan Makanan menurut Kabupaten/Kota, 2008

Kota/Kabupaten	Persentase	
	Makanan	Bukan Makanan
(1)	*(2)*	*(3)*
Kabupaten		
1. Nias	73,80	26,20
2. Mandailing Natal	67,90	32,10
3. Tapanuli Selatan	61,44	38,56
4. Tapanuli Tengah	67,28	32,72
5. Tapanuli Utara	60,03	39,97
6. Toba Samosir	59,83	40,17
7. Labuhan Batu	56,88	43,12
8. Asahan	55,90	44,10
9. Simalungun	61,00	39,00
10. Dairi	63,25	36,75
11. Karo	64,06	35,94
12. Deli Serdang	52,60	47,40
13. Langkat	58,21	41,79
14. Nias Selatan	72,39	27,61
15. Humbang Hasundutan	64,41	35,59
16. Pakphak Barat	68,25	31,75
17. Samosir	66,68	33,32
18. Serdang Bedagai	58,92	41,08
19. Batubara	58,42	41,58
Kota		
20. Sibolga	58,69	41,31
21. Tanjung Balai	60,13	39,87
22. Pematang Siantar	52,17	47,83
23. Tebing Tinggi	54,27	45,73
24. Medan	42,60	57,40
25. Binjai	60,03	39,97
26. Padangsidimpuan	56,92	43,08
Sumatera Utara	**55,30**	**44,70**
• **Perkotaan**	**50,25**	**49,75**
• **Pedesaan**	**61,82**	**38,18**

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, BPS Provinsi Sumatera Utara

http://sumut.bps.go.id

Dengan memperhatikan kondisi daerah kabupaten/kota terlihat bahwa persentase pengeluaran untuk makanan di daerah kabupaten relatif lebih tinggi dibandingkan daerah kota. Persentase tertinggi pengeluaran untuk makanan di Kabupaten Nias (73,80 persen), disusul Kabupaten Nias Selatan (72,39 persen). Sedangkan persentase terendah pengeluaran untuk makanan terjadi di Kota Medan (42,60 persen) dan Kota Pematang Siantar (47,83 persen).

7.2.2. Pengeluaran Untuk Makanan

Persentase konsumsi bahan makanan tertinggi adalah pemenuhan bahan makanan padi-padian, untuk Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 sebesar 11,60 persen, dilanjutkan dengan makanan jadi 9,73 persen.

Tabel 7.3. menunjukkan bahwa bagian terbesar pengeluaran rumahtangga di daerah pedesaan dipergunakan untuk konsumsi makanan dan dibelanjakan untuk bahan makanan yang berupa padi-padian (16,81 persen). Pengeluaran ini jauh lebih tinggi daripada penduduk di daerah perkotaan yang hanya 7,54 persen. Fenomena ini menunjukkan bahwa penduduk perdesaan masih banyak memprioritaskan kebutuhan akan bahan makananan dibandingkan penduduk daerah perkotaan.

http://sumut.bps.go.id

7.2.3. Pengeluaran Untuk Bukan Makanan

Selain pertumbuhan pendapatan/ pengeluaran, persentase pengeluaran per kapita sebulan untuk bukan makanan juga dapat menggambarkan keadaan kesejahteraan masyarakat suatu daerah, dimana semakin tinggi persentase pengeluaran untuk bukan makanan semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Pengeluaran rumahtangga pada kelompok bukan makanan, sebagian besar digunakan untuk pengeluaran aneka barang dan jasa (17,83 persen) dam perumahan, bahan bakar, penerangan dan air (16,73 persen). Persentase pengeluaran penduduk per-kotaan untuk perumahan, bahan bakar, penerangan dan air lebih tinggi (30,23 persen) dibandingkan penduduk daerah perdesaan (12,24 persen). Demikian juga halnya dengan pengeluaran untuk aneka barang dan jasa, yaitu 20,77 persen berbanding 14,06 persen.

Tabel 7.3 Persentase Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Untuk Makanan Provinsi Sumatera Utara, 2008

Komoditi	Perkotaan		Pedesaan		Perkotaan + Pedesaan	
	Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
Makanan	**227.521**	**47,63**	**198.301**	**62,30**	**211.773**	**54,06**
Padi padian	36.032	7,54	53.508	16,81	45.450	11,60
Umbi umbian	1.548	0,32	2.424	0,76	2.020	0,52
Ikan	28.217	5,91	23.683	7,44	25.773	6,58
Daging	7.205	1,51	4.335	1,36	5.658	1,44
Telur dan Susu	17.348	3,63	8.725	2,74	12.701	3,24
Sayur sayuran	19.769	4,14	20.639	6,48	20.238	5,17
Kacang-kacangan	3.842	0,80	3.220	1,01	3.507	0,90
Buah buahan	10.277	2,15	6.298	1,98	8.133	2,08
Minyak dan Lemak	10.641	2,23	11.078	3,48	10.876	2,78
Bahan Minuman	7.735	1,62	8.290	2,60	8.034	2,05
Bumbu-bumbuan	3.335	0,70	3.113	0,98	3.215	0,82
Konsumsi lainnya	3.671	0,77	3.052	0,96	3.337	0,85
Makanan dan Minuman jadi	52.265	10,94	25.985	8,16	38.102	9,73
Tembakau dan sirih	25.638	5,37	23.951	7,53	24.729	6,31
Bukan Makanan	**250.148**	**52,37**	**119.975**	**37,70**	**179.993**	**45,94**
Perumahan	96.632	20,23	38.949	12,24	65.545	16,73
Aneka barang dan jasa	99.195	20,77	44.765	14,06	69.861	17,83
Pakaian, alas kaki dan tutup kepala	16.706	3,50	12.626	3,97	14.507	3,70
Barang tahan lama	24.053	5,04	16.731	5,26	20.107	5,13
Pajak dan Asuransi	7.523	1,57	1.965	0,62	4.528	1,16
Keperluan Pesta dan upacara	6.039	1,26	4.938	1,55	5.446	1,39
TOTAL	**477.669**	**100,00**	**318.276**	**100,00**	**391.766**	**100,00**

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, BPS Provinsi Sumatera Utara

http://sumut.bps.go.id

7.3. Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit tunggal yang walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, tetapi mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mampu mencerminkan status kemampuan dasar ***(basic capabilities)*** penduduk. Ketiga kemampuan dasar itu adalah umur panjang dan sehat, berpengetahuan dan berketerampilan, serta akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak.

Konsep Pembangunan Manusia berbeda dengan pembangunan yang memberikan perhatian utama pada pertumbuhan ekonomi, dengan diasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi pada akhirnya akan menguntungkan manusia. Fakta menunjukkan bahwa banyak daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi cukup baik namun memiliki kualitas pembangunan manusia yang rendah. Hal ini mungkin terjadi karena tingkat PDRB yang tinggi di suatu daerah tersebut belum tentu dinikmati langsung oleh masyarakatnya.

Untuk melihat perkembangan IPM di Kabupaten/Kota, tingkatan status pembangunan manusia dibedakan 4 kriteria yaitu tinggi, menengah atas, menengah bawah dan rendah. Jika status pembangunan manusia masih berada pada kriteria rendah hal ini berarti kinerja pembangunan manusia daerah tersebut masih memerlukan perhatian khusus untuk mengejar ketinggalannya. Begitu juga jika status pembangunan manusia masih berada pada kriteria menengah hal ini berarti pembangunan manusia masih perlu ditingkatkan.

http://sumut.bps.go.id

Tabel 7.4. Tingkatan Status dan Kriteria Pembangunan Manusia

Tingkatan Status	Kriteria
(1)	*(2)*
Rendah	IPM < 50
Menengah bawah	50 ≤ IPM < 66
Menengah atas	66 ≤ IPM < 80
Tinggi	IPM ≥ 80

Sumber : Laporan Pembangunan Manusia

Pada tahun 1990 kualitas pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara sudah berstatus Menengah atas, yang ditandai dengan nilai IPM sebesar 67,0. Pelaksanaan pembangunan selama periode 1990-1996 telah dapat meningkatkan kualitas pembangunan manusia Sumatera Utara yang ditandai dengan meningkatnya nilai IPM menjadi 70,5 pada tahun 1996.

Kondisi sebaliknya terjadi pada tahun 1999, dimana pengaruh krisis di segala sektor kehidupan telah mengakibatkan menurunnya kualitas manusia secara nasional dan termasuk Sumatera Utara. Pada tahun 1999 kualitas pembangunan manusia Provinsi Sumatera Utara mengalami kemunduran bahkan keterpurukan sehingga lebih buruk dengan kondisi tahun 1996. Sehingga dengan melihat kenyataan ini dapat dikatakan kondisi pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara kembali pada kondisi 8 s/d 9 tahun yang lalu. Hal ini dapat terlihat dari nilai IPM Provinsi Sumatera Utara pada tahun 1999 yang tercatat sebesar 66,6. Kondisi tersebut lebih disebabkan karena tingkat daya beli masyarakat Tapanuli Selatan sebagai salah satu komponen IPM jatuh terpuruk.

Kualitas pembangunan manusia di Tapanuli Selatan mulai menunjukkan kondisi yang menunjukkan perbaikan sejak tahun 2004, dimana kualitas pembangunan manusia yang digambarkan dengan IPM jauh meningkat dibanding tahun 1999 yaitu menjadi 71,4 tahun 2004 dan tahun 2008 diperkirakan sebesar 73,3.

http://sumut.bps.go.id

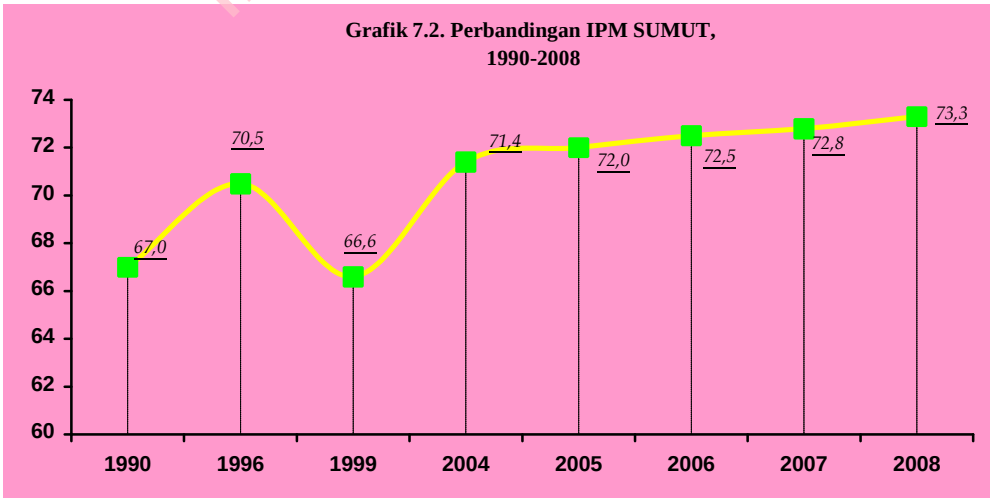

Untuk melihat posisi Kualitas Pembangunan Manusia Sumatera Utara menurut kabupaten/kota, pada tabel berikut disajikan IPM kabupaten/kota di Sumatera Utara. Pada tabel 7.5 berikut dapat dilihat peringkat kualitas pembangunan manusia

di Sumatera Utara untuk periode 2006 dan 2008. Kabupaten Nias Selatan merupakan daerah dengan kualitas pembangunan manusia paling rendah, disusul Kabupaten Nias dan Mandailing Natal. Sebaliknya Kota Pematang Siantar merupakan daerah dengan kualitas pembangunan manusia paling tinggi.

Tabel 7.5. Perbandingan Tingkat dan Status Pembangunan Manusia Kab. Tapanuli Selatan dengan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara 2006-2008

No	Kabupaten/Kota	2006			2008		
		IPM	Status	Rangk.	IPM	Status	Rangk.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kabupaten							
1	Nias	66,80	MA	25	67,55	MA	29
2	Mandailing Natal	69,42	MA	23	69,92	MA	28
3	Tapanuli Selatan	72,46	MA	12	73,33	MA	11
4	Tapanuli Tengah	69,51	MA	22	70,48	MA	26
5	Tapanuli Utara	72,56	MA	11	73,53	MA	10
6	Toba Samosir	75,17	MA	4	75,75	MA	4
7	Labuhan Batu	72,03	MA	13	73,08	MA	15
8	Asahan	70,67	MA	19	71,57	MA	22
9	Simalungun	71,66	MA	15	72,49	MA	18
10	Dairi	71,31	MA	18	72,01	MA	20
11	Karo	73,52	MA	8	74,43	MA	6
12	Deli Serdang	73,20	MA	9	74,36	MA	8
13	Langkat	71,53	MA	17	72,24	MA	19
14	Nias Selatan	64,51	MB	26	65,59	MB	30
15	Humbang Hasundutan	70,48	MA	20	71,24	MA	23
16	Pakpak Barat	69,11	MA	24	69,95	MA	27
17	Samosir	72,75	MA	10	73,24	MA	13
18	Serdang Bedagai	71,55	MA	16	72,59	MA	17
19	Batu Bara	70,37	MA	21	70,98	MA	25
20	Padang Lawas Utara	-	-	-	71,85	-	21
21	Padang Lawas	-	-	-	71,15	-	24
22	Labuhan Batu Selatan	-	-	-	73,16	-	14
23	Labuhan Batu Utara	-	-	-	72,80	-	16
kota							
24	Sibolga	73,70	MA	6	74,39	MA	7
25	Tanjung Balai	71,90	MA	14	73,26	MA	12
26	Pematang Siantar	75,95	MA	1	76,95	MA	1
27	Tebing Tinggi	75,00	MA	5	75,69	MA	5
28	Medan	75,65	MA	2	76,70	MA	2
29	Binjai	75,30	MA	3	75,88	MA	3
30	Padangsidimpuan	73,61	MA	7	74,26	MA	9
	Sumatera Utara	**72,46**	**MA**		**73,29**	**MA**	

Sumber : BPS Propinsi Sumatera Utara
Keterangan : -) Masih tergabung Kabupaten Induk MA : Menengah Atas
MB:Menengah Bawah

http://sumut.bps.go.id

BAB VIII
KETENAGAKERJAAN

Masalah ketenagakerjaan merupakan permasalahan dan isu yang komplek serta terus berkembang, sehingga tidak hanya menjadi masalah daerah namun telah menjadi masalah nasional bahkan regional dan internasional. Masalah ketenagakerjaan harus membutuhkan perhatian yang sangat serius dari semua pihak terkait, baik pemerintah, pengusaha, pekerja itu sendiri dan pihak lainnya. Saat ini pembangunan ketenagakerjaan dititikberatkan pada tiga masalah pokok, yakni perluasan dan pengembangan lapangan kerja, peningkatan kualitas dan kemampuan tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja

Secara teori tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk yang mampu bekerja memproduksi barang dan jasa. Pada analisis ketenagakerjaan ini digunakan batasan bahwa penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun keatas yang terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

Dalam analisis tenaga kerja, bagian yang sangat penting mendapat perhatian adalah angkatan kerja. Angkatan kerja ***(economically active)*** didefinisikan bagian dari tenaga kerja yang benar-benar siap bekerja untuk memproduksi barang dan jasa. Mereka yang siap bekerja ini terdiri dari yang benar-benar bekerja dan pengangguran. Pengangguran disini didefinisikan sebagai angkatan kerja yang tidak bekerja dan saat sedang mencari kerja atau mempersiapkan usaha atau juga orang yang sudah merasa putus asa untuk mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya Tenaga kerja yang termasuk kedalam bukan angkatan kerja ***(uneconomically active)*** adalah mereka yang bersekolah, mengurus rumahtangga, penerima pendapatan (pensiunan) dan lain-lain.

Masalah ketenagakerjaan di Indonesia termasuk di Provinsi Sumatera Utara diperkirakan akan semakin kompleks. Indikasi ini terlihat di samping pertambahan penduduk usia kerja setiap tahunnya yang terus meningkat sebagai implikasi dari jumlah penduduk yang cukup besar disertai struktur umur yang cenderung mengelompok pada usia muda juga masih tingginya angka pengangguran terutama pengangguran terbuka.

http://sumut.bps.go.id

Selain pengangguran terbuka ***(disguised unemployed)*** dan pengangguran terselubung yaitu mereka yang bekerja kurang dari jam kerja normal ***(under employed)*** juga merupakan permasalahan ketenagakerjaan yang perlu mendapat perhatian. Kondisi tersebut banyak terjadi di Tapanuli Selatan yang antara lain sebagai konsekuensi dari masyarakat bercorak agraris dan lapangan pekerjaan yang sangat terbatas serta semakin banyak calon tenaga kerja baru baik yang berpendidikan maupun tidak.

Untuk memberikan gambaran mengenai ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Utara dalam bagian ini akan disajikan kondisi ketenagakerjaan dilihat dari penduduk usia kerja, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja ***(TPAK),*** dan tingkat penganggguran. Selain itu, disajikan pula secara singkat indikator-indikator ketenagakerjaan yang meliputi, status pekerjaan, lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan, serta jam kerja.

http://sumut.bps.go.id

Tabel 8.1. Jumlah dan Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Kegiatan Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin, 2006-2008

Kegiatan Utama	2006		2007		2008	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
Angkatan Kerja	**5.491.696**	**66,90**	**5.654.131**	**67,49**	**6.094.802**	**68,33**
- Bekerja	4.859.647	59,20	5.082.797	60,67	5.540.263	62,11
- Pengangguran	632.049	7,70	571.334	6,82	554.539	6,22
Bukan Angkatan Kerja	**2.716.955**	**33,10**	**2.724.017**	**32,51**	**2.825.171**	**31,67**
Jumlah	**8.208.651**	**100,00**	**8.378.148**	**100,00**	**8.919.973**	**100,00**
T P A K (%)	**66,90**		**67,49**		**68,33**	
TPT (%)	**11,51**		**10,10**		**9,10**	

Sumber : Sumatera Utara Dalam Angka

8.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Berdasarkan data tahun 2008, jumlah penduduk usia kerja di Sumatera Utara adalah 8.919.973 orang yang terdiri dari 6.094.802 angkatan kerja dan sisanya sebanyak 2.825.171 orang termasuk bukan angkatan kerja. Selanjutnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator yang mampu menggambarkan sejauh

mana peran angkatan kerja disuatu daerah. Semakin tinggi nilai TPAK nya semakin besar pula keterlibatan penduduk usia kerja didalam pasar kerja.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa TPAK di Sumatera Utara tahun 2008 adalah sebesar 68,33 persen yang artinya bahwa pada tahun 2008 sebanyak 68,33 persen penduduk usia kerja di Sumatera Utara siap terjun dalam pasar kerja baik itu bekerja atau mencari kerja/mempersiapkan usaha atau dengan kata lain berstatus sebagai penggangguran.

Jika dilihat pekembangannya, tingkat partisipasi angkatan kerja di Sumatera Utaramenunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2005 TPAK Sumatera Utara tercatat 66,90 persen kemudian meningkat menjadi 67,49 persen tahun 2006 dan kembali naik pada tahun 2008 menjadi 68,33 persen.

8.2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Selanjutnya indikator ketenagakerjaan lainnya yang sangat penting adalah tingkat pengangguran. Dimana pengangguran yang dianggap paling serius untuk diatasi adalah pengangguran terbuka, yaitu angkatan kerja yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari/mempersiapkan pekerjaan. Data tahun 2008 menunjukkan, bahwa tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Utara adalah sebesar 9,10 persen dari total angkatan kerja lebih rendah dibanding tahun 2007 yang sebesar 10,10 persen serta tahun 2006 (11,51%). Kecenderungan menurunnya tingkat pengangguran terbuka ini tentunya sinyal positif bagi kesejahteraan di Sumatera Utara karena sangat disadari bahwa semakin tinggi pengangguran akan berakibat pada meningkatnya kerawanan sosial.

http://sumut.bps.go.id

8.3. Karakteristik Penduduk Bekerja

8.3.1. Lapangan Pekerjaan Dan Jenis Pekerjaan

Sektor pertanian masih merupakan sektor yang sangat dominan bagi perekonomian maupun penyerapan tenaga kerja di Sumatera Utara. Perkembangan 3 tahun terakhir menunjukkan bahwa sektor pertanian masih mendominasi dalam penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2006 sebanyak 49,64 persen penduduk Sumatera Utara bekerja di sektor *Agriculture*/ pertanian, kemudian disusul sektor ***Service*** (Angkutan, Perdagangan, Keuangan dan Jasa) sebesar 38,97 persen dan sisanya 11,4

persen pada sektor ***Manufacture*** (Pertambangan/penggalian, Industri, Listrik Gas dan Air serta Bangunan) seperti yang terlihat pada grafik 8.1.

Pada tahun 2007 dan 2008 kondisinya relatif sama, dimana pertanian masih mendominasi walaupun menunjukkan sedikit penurunan yaitu 47,6 persen pada tahun 2007 dan 47,12 persen tahun 2008, disusul sektor ***Service*** sebesar 39,41 persen pada tahun 2007 dan 2008 serta sektor ***Manufacture*** sebesar 12,93 persen dan 13,47 persen pada tahun 2007 dan 2008.

Besarnya peran sektor Pertanian dalam perekonomian Sumatera Utara antara lain disebabkan daerah ini memang merupakan potensi sektor pertanian baik itu pertanian tanam pangan, peternakan, perkebunan, kehutanan dan perikanan karena didukung oleh lahan yang cukup luas dan subur.

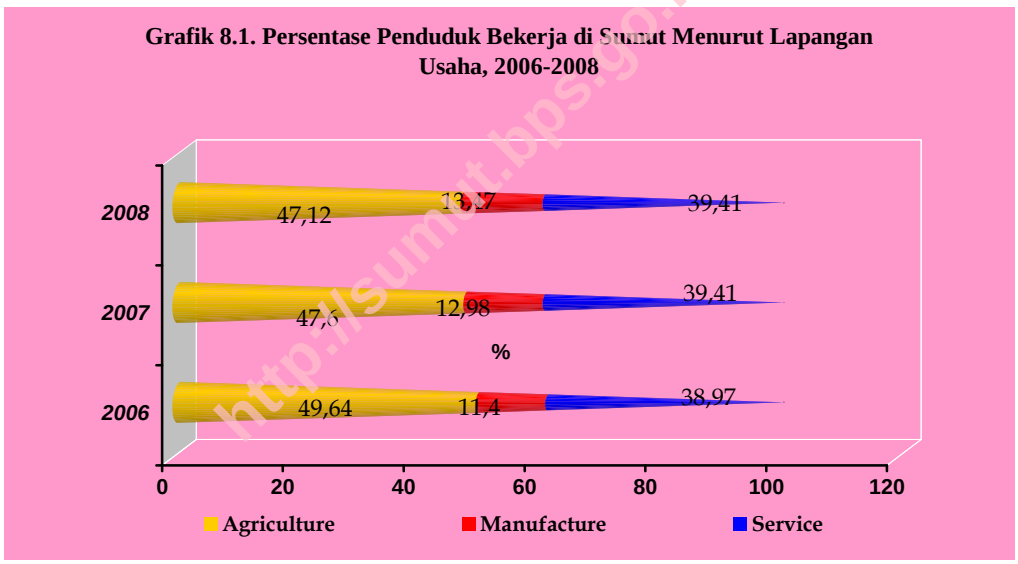

http://sumut.bps.go.id

8.3.2. Status Pekerjaan

Status Pekerjaan dibedakan menjadi tujuh macam, yaitu berusaha sendiri, berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap, berusaha dibantu dengan buruh tetap, buruh/karyawan, pekerja bebas serta pekerja keluarga. Klasifikasi status pekerjaan ini bermanfaat terutama untuk membandingkan proporsi penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan tersebut.

Pada umumnya pekerja keluarga, pengusaha tanpa buruh dan pengusaha dengan bantuan pekerja keluarga lebih menonjol pada sektor dan jenis pekerja yang relatif '***tradisional***', sedangkan sektor dan jenis yang relatif modern terdapat lebih banyak

buruh atau karyawan dan pengusaha yang dengan buruh tetap. Pekerja keluarga biasanya mengelompok pada sektor-sektor pertanian, terutama dikalangan perempuan dan penduduk laki-laki berusia muda.

Pada umumnya penduduk Sumatera Utara yang bekerja berstatus sebagai buruh/karyawan. Pada tahun 2008 sebanyak 34,14 persen pekerja di Sumatera Utara berstatus buruh/karyawan, kemudian disusul berusaha dibantu buruh tidak tetap 24,74 persen dan 17 persen berusaha sendiri.

Grafik 8.2. Persentase Penduduk Bekerja di Sumut Menurut Status Pekerjaan, 2008

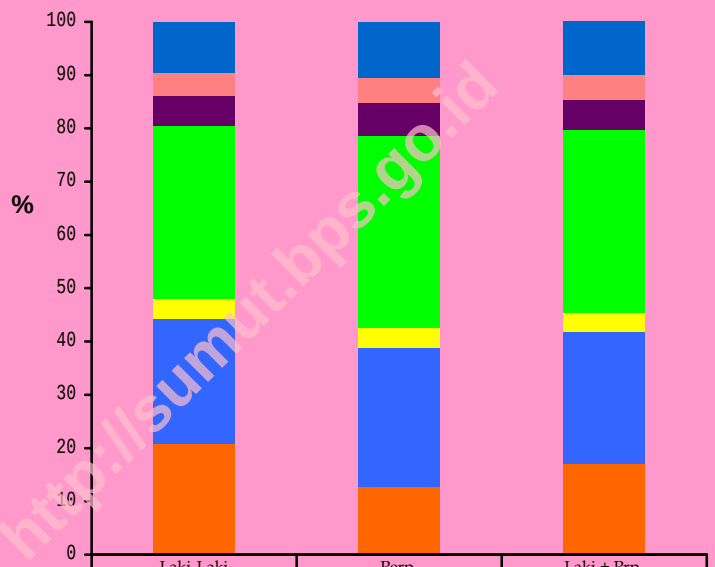

http://sumut.bps.go.id

	Laki-Laki	Perp.	Laki + Prp.
Pekerjaan Keluarga	9,47	10,43	9,92
Pekerja Bebas di Non Pertanian	4,43	4,88	4,65
Pekerja Bebas di Pertanian	5,51	6,07	5,78
Buruh/Karyawan	32,57	35,87	34,14
Berusaha Dengan Buruh Tetap	3,59	3,95	3,76
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap	23,6	26	24,74
Berusaha Sendiri	20,82	12,79	17

8.3.3. Jam Kerja Seminggu

Jam kerja normal (35 jam seminggu atau lebih) masih sering dipakai sebagai patokan untuk mengelompokkan seorang pekerja, apakah ia termasuk pekerja penuh atau pekerja paruh waktu. Seorang pekerja dikatakan sebagai bekerja penuh ***(full employed)*** bila jam kerjanya mencapai 35 jam kerja atau lebih dalam seminggu.

Sebaliknya dikatakan bekerja tidak penuh bila jam kerjanya kurang dari 35 jam dalam seminggu.

Pada tahun 2008 pekerja di Sumatera Utara yang mempunyai jam kerja normal sudah relatif tinggi, yaitu sebesar 69,32 persen. Jika dibandingkan antara laki-laki dan perempuan, persentasenya sangat berbeda yaitu laki-laki 76 persen dan perempuan 59 persen. Sebaliknya untuk rata-rata jam kerja satu minggu dibawah jam kerja normal didominasi oleh perempuan. Hal ini sangat dimaklumi karena umumnya perempuan lebih memilih bekerja paruh waktu.

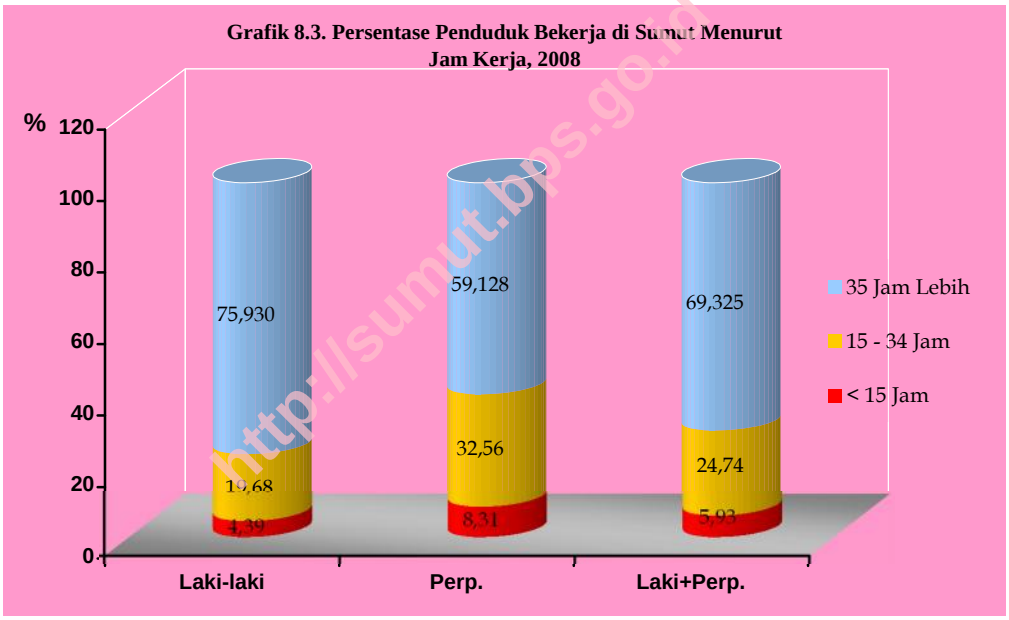

http://sumut.bps.go.id

8.4. Kegiatan Informal

Dalam publikasi ini, batasan kegiatan informal didekati melalui kombinasi antara jenis pekerjaan utama dan status pekerjaan. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2008 yang disajikan dalam tabel 8.2. diketahui bahwa penduduk Sumatera Utara berumur 15 tahun ke atas yang bekerja di kegiatan informal paling dominan berbekal pendidikan Sekolah Dasar (SD) yaitu sebesar 32,43 persen dan sebaliknya yang paling rendah adalah yang berpendidikan Diploma I/II/III, Akademi/Universitas sebesar 2,02 persen.

Tabel 8.2 Persentase Penduduk Sumatera Utara Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Informal menurut Kabupaten/Kota Dan Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan

Kab/Kota	Tidak/Blm Pernah Sekolah	Tidak/Blm Tamat SD	Sekolah Dasar	SLTP	SLTA	Diploma I/II/III Akademi/ Universitas	Total
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
Kabupaten							
1. Nias	12,02	21,30	39,79	15,69	10,73	0,47	100,00
2. Mandailing Natal	0,26	10,59	51,25	19,84	16,51	1,54	100,00
3. Tapanuli Selatan	0,00	8,96	45,12	26,46	18,61	0,85	100,00
4. Tapanuli Tengah	1,26	19,34	37,31	23,56	17,36	1,17	100,00
5. Tapanuli Utara	0,70	10,04	29,29	32,14	25,31	2,52	100,00
6. Toba Samosir	0,52	11,03	20,47	35,48	31,09	1,41	100,00
7. Labuhan Batu	0,64	16,19	35,26	24,63	21,14	2,15	100,00
8. Asahan	1,84	14,07	40,46	24,10	18,37	1,16	100,00
9. Simalungun	0,19	14,67	33,11	29,30	21,30	1,43	100,00
10. Dairi	1,28	7,75	29,93	35,72	23,63	1,69	100,00
11. Karo	1,62	10,98	28,00	26,91	29,14	3,35	100,00
12. Deli Serdang	0,79	17,45	26,03	23,87	29,22	2,65	100,00
13. Langkat	2,00	17,96	36,52	20,29	21,98	1,25	100,00
14. Nias Selatan	38,50	22,08	22,00	13,37	3,71	0,34	100,00
15. Humb.Hasundutan	3,37	12,49	27,39	31,91	23,49	1,35	100,00
16. Pakpak Bharat	1,09	17,89	33,90	26,30	19,99	0,84	100,00
17. Samosir	1,15	13,55	21,75	30,58	31,53	1,44	100,00
18. Serdang Bedagai	1,65	15,90	32,66	28,49	20,22	1,09	100,00
20. Batubara	3,53	18,88	36,70	18,66	21,54	0,69	100,00
Kota							
21. Sibolga	0,00	9,81	27,86	29,16	31,58	1,59	100,00
22. Tanjung Balai	0,65	7,13	34,93	26,09	29,73	1,47	100,00
23. Pematang Siantar	0,27	6,98	23,50	28,70	38,47	2,08	100,00
24. Tebing Tinggi	0,22	5,39	24,22	27,34	40,88	1,95	100,00
25. Medan	0,16	3,80	19,13	32,36	37,52	7,04	100,00
26. Binjai	0,00	10,05	30,34	30,40	28,08	1,13	100,00
27. Padangsidimpuan	0,00	7,96	24,54	27,78	35,61	4,12	100,00
Sumatera Utara	**2,81**	**13,75**	**32,43**	**25,72**	**23,28**	**2,02**	**100,00**

Sumber : Sakernas Agustus 2008

Kabupaten Nias Selatan yang merupakan kabupaten paling terpencil, persentase pekerja informalnya yang berpendidikan tidak/belum pernah sekolah tercatat paling tinggi dibandingkan kabupaten/kota yang lain yaitu sebesar 38,50 persen, sebaliknya yang berpendidikan tinggi persentasenya paling rendah yaitu 0,34 persen. Kondisi ini cukup berbeda dengan kabupaten lainnya dimana umumnya pekerja informal berpendidikan sekolah dasar. Kemudian untuk wilayah kota tingkat pendidikan

pekerja informalnya berpendidikan lebih tinggi tentunya Hal yang cukup berbeda dapat dilihat di wilayah kota dimana persentase pendidikan yang tinggi sehingga akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Tabel 8.3 Persentase Penduduk Sumatera Utara Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Informal menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2008

Kabupaten/Kota	Lapangan Pekerjaan					
	Pertanian	Industri	Perdagangan	Jasa	Lainnya	Total
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
Kabupaten						
1. Nias	95,05	0,27	2,31	0,78	1,59	100,00
2. Mandailing Natal	85,35	0,80	8,80	0,47	4,58	100,00
3. Tapanuli Selatan	88,21	0,65	7,57	0,50	3,07	100,00
4. Tapanuli Tengah	81,52	2,76	9,41	1,84	4,46	100,00
5. Tapanuli Utara	86,95	3,06	5,45	1,18	3,35	100,00
6. Toba Samosir	88,98	1,07	6,48	0,89	2,58	100,00
7. Labuhan Batu	69,22	3,02	14,36	4,49	8,91	100,00
8. Asahan	56,27	5,05	19,32	6,82	12,54	100,00
9. Simalungun	69,89	4,09	13,24	4,89	7,88	100,00
10. Dairi	89,99	0,96	5,87	1,06	2,13	100,00
11. Karo	86,15	0,85	8,13	1,44	3,44	100,00
12. Deli Serdang	41,62	7,11	27,50	7,17	16,60	100,00
13. Langkat	58,22	5,67	20,04	5,38	10,69	100,00
14. Nias Selatan	95,10	1,48	1,90	0,36	1,16	100,00
15. Humb.Hasundutan	94,91	0,00	2,08	1,45	1,56	100,00
16. Pakpak Bharat	95,81	0,28	2,01	0,30	1,60	100,00
17. Samosir	92,74	0,89	4,40	0,24	1,72	100,00
18. Serdang Bedagai	70,59	5,93	13,63	2,93	6,92	100,00
20. Batubara	57,55	6,60	21,45	5,49	8,91	100,00
Kota						
21. Sibolga	7,09	5,86	50,29	9,72	27,05	100,00
22. Tanjung Balai	23,41	4,28	40,65	6,32	25,35	100,00
23. Pematang Siantar	27,48	4,17	48,73	8,79	10,83	100,00
24. Tebing Tinggi	6,83	3,81	57,11	11,12	21,14	100,00
25. Medan	7,33	4,30	51,18	12,05	25,13	100,00
26. Binjai	17,93	6,42	43,98	9,45	22,23	100,00
27. Padangsidimpuan	41,59	3,12	33,19	5,20	16,91	100,00
Sumatera Utara	**65,74**	**3,49**	**17,42**	**4,22**	**9,13**	**100,00**

http://sumut.bps.go.id

Sumber : Sakernas Agustus 2008

Selanjutnya pada tabel 8.3. diatas disajikan penduduk yang bekerja pada kegiatan informal di Sumatera Utara menurut lapangan pekerjaan. Diketahui bahwa pekerja informal ini mayoritas bekerja di sektor pertanian yaitu sebesar 65,74 persen, dan perdagangan 17,42 persen. Pada sektor pertanian persentase tertinggi adalah Kabupaten Pakpak Bharat yaitu sebesar 95,81 persen, hal ini tampak bahwa masyarakat di kabupaten tersebut sektor pertanian yang menjadi mata pencaharian di kegiatan informal. Sedangkan daerah perkotaan seperti Tebing Tinggi, Medan, Pematang Siantar, dan Binjai persentase penduduk yang bekerja di sektor perdagangan cukup tinggi, yaitu masing-masing sebesar 57,11 persen, 51,18 persen, 48,73 persen dan 43,98 persen.

http://sumut.bps.go.id

BAB IX
PERUMAHAN

Salah satu kebutuhan pokok manusia selain sandang dan pangan adalah papan (perumahan). Sampai saat ini Permintaan rumah akan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Di pihak lain, terbatasnya lahan untuk permukiman dan penawaran perumahan hanya dapat dijangkau oleh golongan masyarakat tertentu. Hal ini merupakan kendala bagi sebagian besar masyarakat golongan menengah ke bawah dalam memenuhi kebutuhan perumah-annya. Tingginya harga rumah akibat permintaan yang terus meningkat, dan tingkat pendapatan penduduk Indonesia yang relatif rendah, menyebabkan banyak rumahtangga yang menempati rumah yang kurang layak, baik dipandang dari segi kesehatan maupun kepadatan penghuninya.

Oleh sebab itu, perumahan merupakan salah satu persoalan utama yang masih memerlukan penanganan cukup serius, baik mengenai kelengkapan sarana perumahan maupun kelengkapan fasilitas lingkungannya. Rumah yang layak sebaiknya mampu memenuhi syarat kesehatan bagi penghuninya. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menentukan status kelayakan sebuah rumah diantaranya adalah luas lantai yang ditempati, jenis atap terluas, jenis dinding terluas, dan kepemilikan sarana dan prasarana penunjang lainnya seperti listrik, air minum, dan tempat pembuangan air besar. Demikian pula letaknya yang mudah untuk menjangkau fasilitas lingkungan seperti sekolah, tempat berobat, pasar dan tempat rekreasi. Dengan kondisi semacam ini, keadaan perumahan beserta lingkungannya dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan rumahtangga dan juga tingkat kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, program kesehatan lingkungan yang bertujuan menjaga, membentuk/mencapai dan melestarikan keadaan lingkungan yang sehat, bersih dan nyaman juga dilakukan. Hal ini disadari bahwa perumahan saat ini tidak hanya sekedar tempat berteduh tetapi merupakan cermin kehidupan masyarakat, sehingga perlu terwujudnya rumah sehat yang dapat memberikan rasa nyaman dan nikmat bagi penghuninya.

http://sumut.bps.go.id

9.1. Kondisi Rumah

Salah satu hal yang dapat dijadikan gambaran kondisi kesejahteraan penduduk dari sisi perumahan adalah status kepemilikan rumah. Status kepemilikan rumah merupakan salah satu indikator perumahan yang menunjukkan penguasaan rumahtangga terhadap rumah yang ditempatinya.

Grafik 9.1. Persentase Rumahtangga SUMUT Menurut Status Kepemilikan Tempat Tinggal, 2008

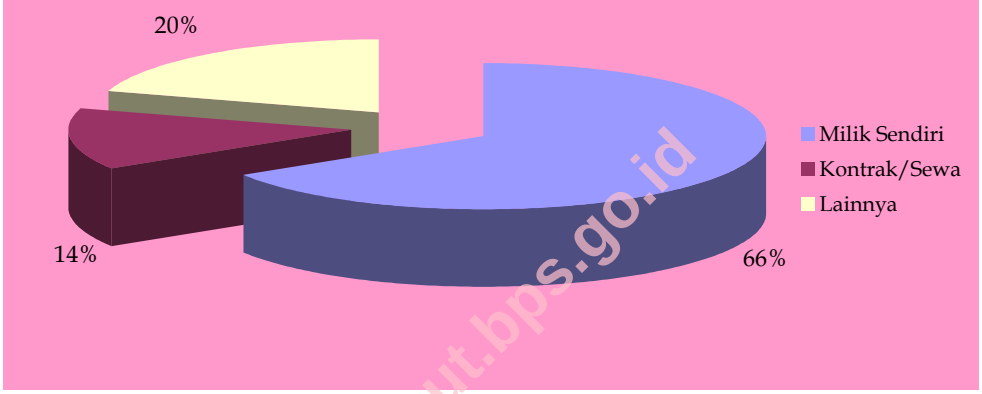

http://sumut.bps.go.id

Hasil Susenas 2008 menunjukkan bahwa sekitar dua per tiga rumahtangga yang ada di Sumatera Utara (66 %) mendiami rumah yang merupakan milik sendiri, sebanyak 14 persen rumahtangga masih menyewa/mengontrak, sedangkan sisanya (20 %) mendiami rumah dinas/bebas sewa/rumah orang tua/famili dan lainnya. Masih cukup besarnya persentase rumahtangga yang menyewa/mengontrak tentunya perlu mendapat perhatian, karena kemungkinan besar mereka yang masih sewa/kontark adalah pendatang, rumahtangga baru atau bahkan mereka yang belum memiliki rum.ah sendiri.

Tingkat kelayakan kondisi tempat tinggal seseorang dapat dilihat dari kondisi rumah tinggalnya. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kelayakan rumah antara lain jenis lantai (bukan tanah), jenis dinding (tembok) dan jenis atap (asbes/seng/genteng). Ketiga indikator ini dianggap mempengaruhi keadaan kesehatan anggota rumahtangga yang juga berdampak pada tingkat kesejahteraannya. Secara umum semakin besar persentase nilai indikator tersebut berarti semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya.

Tabel. 9.1. Kondisi Perumahan Sumatera Utara, 2004-2008

Uraian	2004	2006	2008
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1. Rata-rata luas lantai perkapita (M^2)	14,47	15,75	18,17
2. Rumahtangga dengan lantai bukan tanah (%)	95,67	93,39	94,54
3. Rumahtangga dengan dinding rumah Tembok (%)	44,09	45,70	50,85
4. Rumahtangga dengan atap beton, genteng, sirap dan seng (%)	90,12	90,06	90,96

Secara umum dapat dikatakan bahwa kondisi perumahan di Sumatera Utara menunjukkan perbaikan. Hal ini diperlihatkan dengan semakin meningkatnya indikator kualitas perumahan. Indikator pertama yang dapat dilihat adalah luas lantai perkapita. Luas lantai dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat karena merupakan salah satu aspek yang dapat menggambarkan keadaan suatu tempat tinggal. Luas lantai terkait dengan tingkat penghasilan rumahtangga, karena harga tanah yang semakin mahal saat ini. Semakin luas lantai suatu rumah-tangga, maka semakin tinggi pula tingkat ekonomi rumahtangga. Dari Susenas dapat diketahui bahwa pada tahun 2008 rata-rata rumahtangga di Sumatera Utara memiliki luas lantai perkapita sekitar 18,17 M^2, angka ini sudah lebih tinggi dibanding tahun 2004 yang sebesar 14,47 M^2.

http://sumut.bps.go.id

Selain luas lantai dapat diketahui juga jenis lantai terluas. Jenis lantai terluas terbuat dari tanah tentunya tidak memenuhi syarat kesehatan, karena dapat menjadi bersarangnya kuman-kuman penyakit. Pada grafik 9.2. diketahui bahwa sekitar 5,46 persen rumahtangga di Provinsi Sumatera Utara masih tinggal di rumah dengan lantai tanah. Kondisi yang memprihatinkan ini masih menjadi pemandangan di daerah perdesaan, sebab masih 7,72 persen rumahtangga sehari-hari tinggal di rumah yang lantainya kurang sehat.

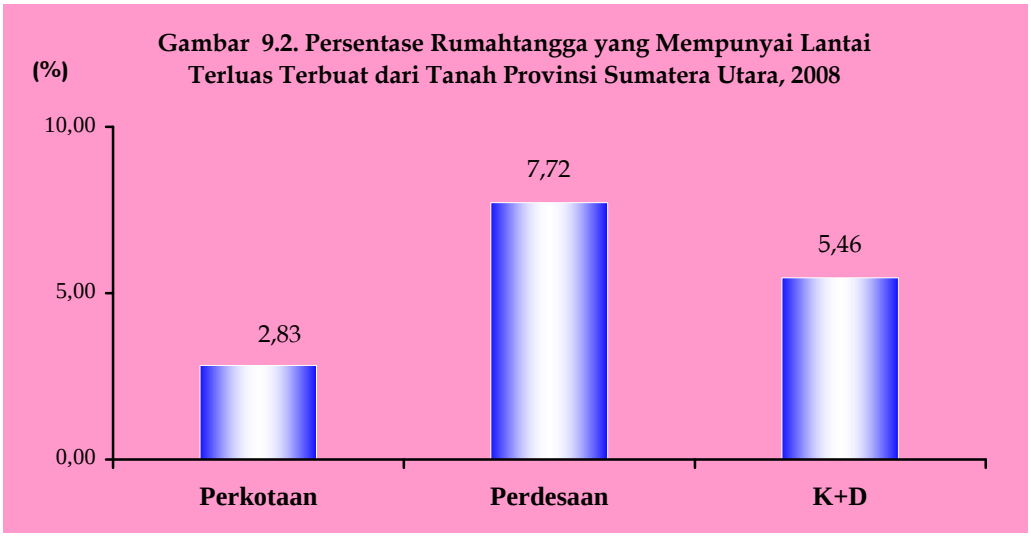

Indikator lain yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kelayakan hunian sebuah rumah tempat tinggal adalah jenis dinding dan atap. Sama halnya dengan lantai, jenis dingding dan atap yang digunakan juga mempengaruhi kondisi kesehatan anggota rumahtangga. Data tahun 2008 memperlihatkan bahwa sekitar 50 persen rumahtangga tinggal di rumah dengan dinding tembok. Selain tembok bahan lain yang cukup dominan adalah kayu yakni sekitar 42 persen. Kemudian untuk atap sudah sekitar 90 persen rumahtangga tinggal di rumah yang memiliki atap memenuhi syarat kesehatan. Tingginya persentase ini disebabkan karena hampir 85 persen rumahtangga di Sumatera Utara bertempat tinggal di ruamah dengan atap seng, karena penggunaan seng ini sudah menjadi kebiasan di Sumatera Utara.

http://sumut.bps.go.id

9.2. Fasilitas Rumah

Rumah yang layak tidak hanya dilihat dari kondisinya tapi juga dari ketersediaan fasilitas penunjang perumahan yang utama diantaranya adalah sumber penerangan utama yang digunakan, kepemilikan fasilitas air minum, dan kepemilikan fasilitas jamban sendiri dengan tangki septik. Fasilitas perumahan yang digunakan oleh rumahtangga dapat mencerminkan tingkat kesehatan rumah beserta lingkungannya. Dari tabel 9.2. dapat diketahui bahwa data 5 tahun terakhir menunjukkan rumahtangga pengguna listrik semakin meningkat. Pada tahun 2008 sebanyak 92,58 persen rumahtangga di Sumatera Utara menggunakan listrik baik PLN maupun non PLN lebih tinggi dibanding tahun 2004 yang sebesar 88 persen

Tabel 9.2. Kondisi Fasilitas Rumah Suamatera Utara, 2004-2008

Uraian	2004	2006	2008
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1. Persentase rumahtangga dengan sumber penerangan listrik (%)	88,01	91,00	92,58
2. Rumah tangga yang memiliki fasilitas air minum sendiri (%)	63,45	63,42	65,63
3. Rumah tangga yang menggunakan jamban sendiri (%)	73,92	71,68	72,76

Sumber : Susenas

Jika dilihat menurut perkotaan dan perdesaan, penggunaan sumber penerangan berasal dari listrik di daerah perkotaan lebih tinggi (98,99 persen) dibandingkan di daerah perdesaan (92,58 persen).

http://sumut.bps.go.id

Gambar 9.3. Persentase Rumahtangga yang Menggunakan Sumber Penerangan dari Listrik Provinsi Sumatera Utara, 2008

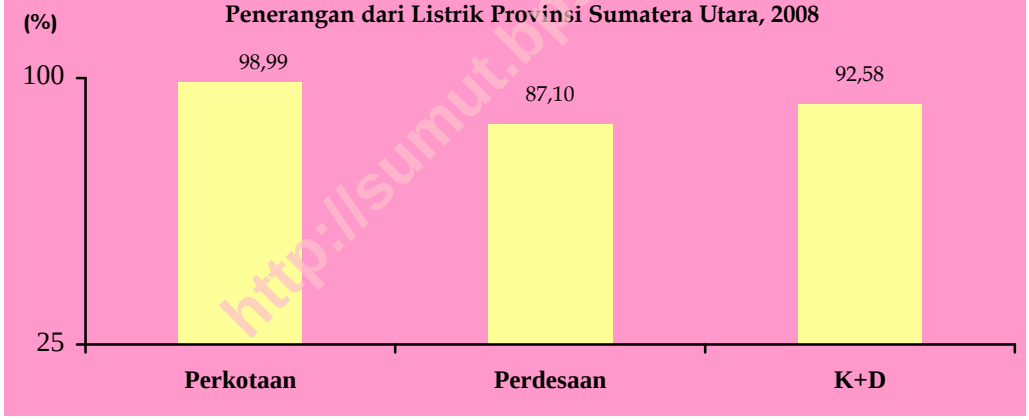

Selanjutnya dari aspek sumber air minum, dapat dikatakan kondisinya masih jauh dari kondisi ideal. Hal ini ditunjukkan dengan data bahwa hanya sekitar 66 persen saja rumahtangga di Sumatera yang memiliki fasilitas air minum sendiri, sedangkan sisanya adalah menggunakan secara bersama-sama bahkan tidak memilikinya. Selain fasilitasnya kelayakan rumah dari aspek air minum adalah dilihat dari sumbernya karena kualitas air yang digunakan terkait erat dengan tingkat kesehatan. Dibanding dengan sumber air lainnya, air kemasan merupakan sumber air yang paling baik kualitasnya kemudian disusul dengan air ledeng. Air yang berasal dari pompa, sumur, sungai, hujan dan sebagainya, dianggap kurang baik karena kemungkinan tercemarnya relatif cukup besar.

Tabel 9.3. Persentase Rumahtangga menurut Sumber Air Minum, Provinsi Sumatera Utara, 2008

Sumber Air Minum	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
Air Kemasan	10,18	1,39	5,44
Ledeng	42,04	5,33	22,14
Pompa	17,67	19,44	18,62
Sumur terlindungi	20,06	26,40	23,47
Sumur tdk terlindungi	7,01	16,46	12,10
Mata Air tidak terlindung	1,37	11,54	6,89
Mata Air terlindungi	0,39	8,74	4,89
Air Sungai/hujan	0,99	9,83	5,76
Lainnya	0,29	0,87	0,60

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, BPS Provinsi Sumatera Utara

http://sumut.bps.go.id

Dari tabel tersebut diketahui bahwa sebagian besar rumah tangga di Sumatera Utara menggunakan sumber air minum dari sumur terlindung yaitu mencapai 23,47 persen kemudian disusul ledeng (22,14 persen). Di daerah perdesaan, penggunaan sumber air dari ledeng dan air kemasan lebih sedikit (6,72 persen) dibandingkan daerah perkotaan (52,22 persen). Sebaliknya, sumber air minum dari mata air, untuk daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan. Hal ini wajar karena pada sebagian daerah pedesaan banyak sumber mata air, dan tidak/belum tersedianya fasilitas air leding.

Selain sumber air minum dan listrik fasilitas rumah lainnya yang sangat penting adalah adalah tempat buang air besar. Tempat buang air besar yang memenuhi syarat kesehatan adalah yang menggunakan tangki septik sehingga limbah manusia tersebut tidak mencemari lingkungan, terutama sumber air minum (pada sumur pompa atau sumur). Oleh karena itu tempat penampungan akhir sangat penting bagi kesehatan lingkungan. Tangki merupakan pilihan terbanyak yang dimiliki oleh rumahtangga di daerah perkotaan sebesar 82,98 persen, sedangkan di perdesaan hanya 78,03 persen. Selain penampungan di tempat lain (42,67 persen) di perdesaan juga banyak rumahtangga yang membuang air besar di sungai/danau/laut sebanyak 18,36 persen.

Tabel 9.3. Persentase Rumahtangga menurut Tempat Penampungan Akhir Kotoran dan Daerah Tempat Tinggal Provinsi Sumatera Utara, 2008

Tempat penampungan kotoran/tinja	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+ Perdesaan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1. Tangki	82,98	38,03	58,75
2. Kolam/sawah	0,62	0,94	0,79
3. Sungai/Danau/Laut	5,24	18,36	12,31
4. Lainnya	11,16	42,67	28,14
J u m l a h	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, BPS Provinsi Sumatera Utara

Selanjutnya jika dilihat dari status kepemilikan fasilitas tempat buang air besar, sebagian besar rumahtangga di Sumatera Utara sudah mempunyai fasilitas sendiri (72,76 persen). Jika dibandingkan, di daerah perkotaan rumahtangga yang mempunyai fasilitas buang air sendiri ini jauh lebih besar yaitu mencapai 87,65 persen lebih besar dibandingkan daerah perdesaan yang hanya 60,03 persen.

http://sumut.bps.go.id

Gambar 9.4. Persentase Rumahtangga menurut Kepemilikan Fasilitas Tempat Buang Air Besar Provinsi Sumatera Utara, 2008

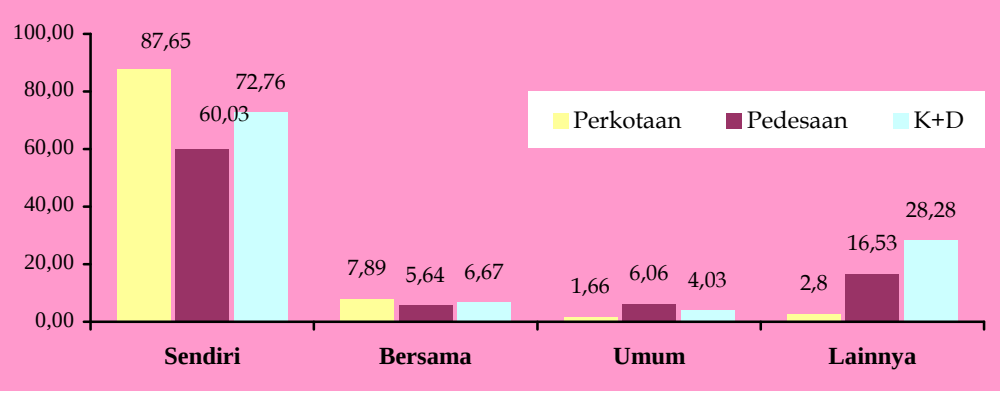

BAB X
ANALISIS DATA PENGANGGURAN SEMESTER I 2009

Pengangguran merupakan salah satu isu penting dalam ketenagakerjaan. Tingginya angka pengangguran tidak hanya menimbulkan masalah-masalah di bidang ekonomi, melainkan juga menimbulkan berbagai masalah di bidang sosial, seperti kemiskinan dan kerawanan sosial. Dari sisi ekonomi, pengangguran merupakan produk dari ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia. Ketersediaan lapangan kerja yang relatif terbatas, tidak mampu menyerap para pencari keja yang senantiasa bertambah setiap tahun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk.

Untuk melihat kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Utara khususnya pengangguran, dalam bab ini secara khusus dianalisis tingkat pengangguran semester I tahun 2009 yang bersumber dari data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) bulan Februari 2009 dan data Sakernas tahun 2008. Untuk lebih memperkaya informasi mengenai kondisi ketenagakerjaan terkini juga ditampilkan beberapa indikator penting seperti : penduduk usia kerja, angkatan kerja, bukan angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), tingkat pengangguran terbuka (TPT), jumlah setengah penganggur, status pekerjaan, dan lapangan pekerjaan utama.

http://sumut.bps.go.id

Penduduk usia kerja di Sumatera Utara pada Februari tahun 2009 meningkat dari 8.794.804 orang pada Februari 2008 menjadi 9.034.908 orang pada Februari 2009 atau meningkat sebanyak 204.104 orang. Meningkatnya penduduk usia kerja ini juga diikuti dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja. Pada Februari 2009, sekitar 69,98 persen dari seluruh penduduk usia kerja merupakan tenaga kerja aktif dalam kegiatan ekonomi (angkatan kerja) yang besarnya mencapai 6.322.414 orang. Jumlah ini meningkat sebanyak 391.522 orang dibandingkan keadaan Februari 2008.

Tabel 10.1. Komposisi Penduduk Sumatera Utara Berumur 15 Tahun Ke Atas menurut Kegiatan Utama, Tahun 2008 dan Februari 2009

Kegiatan Utama	Satuan	2008		2009
		Februari	Agustus	Februari
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1. Penduduk 15 tahun ke atas	Orang	8.794.804	8.919.973	9.034.908
2. Angkatan Kerja	Orang	5.930.892	6.094.802	6.322.414
a. Bekerja	Orang	5.364.414	5.540.263	5.800.771
b. Penganggur	Orang	566.478	554.539	521.643
3. Bukan Angkatan Kerja	Orang	2.863.912	2.825.171	2.712.494
a. Sekolah	Orang	879.420	922.774	940.908
b. Mengurus Rumah Tangga	Orang	1.495.955	1.450.162	1.389.154
c. Lainnya	Orang	488.537	452.235	382.432

Sumber : Sakernas Februari dan Agustus 2008 dan Sakernas Februari 2009

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, untuk melihat besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang atau jasa dalam suatu perekonomian dipakai ukuran yaitu TPAK. Dalam kurun waktu satu tahun terakhir (Februari 2008– Februari 2009) TPAK Sumatera Utara mengalami peningkatan sebesar 2,54 persen, yaitu dari 67,44 persen pada Februari 2008 menjadi 69,98 persen pada Februari 2009.

Dilihat menurut wilayah tempat tinggal TPAK di perdesaan relatif lebih tinggi dibanding perkotaan. Pada Februari 2009 TPAK daerah perkotaan sebesar 65,95 persen atau lebih rendah dari TPAK daerah perdesaan sebesar 73,76 persen. Hal ini disebabkan karena di daerah perdesaan yang umumnya didominasi lapangan pekerjaan pertanian sehingga mereka yang mempunyai kegiatan utama mengurus rumahtangga dan sekolah juga bekerja di sektor pertanian sebagai pekerja keluarga dan otomatis mereka ini tergolong sebagai angkatan kerja. Selanjutnya dilihat berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki yang sebesar 83,06 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan TPAK perempuan sebesar 57,26 persen. Hal ini disebabkan besarnya persentase penduduk perempuan yang mengurus rumahtangga, sementara penduduk laki-laki umumnya sebagai pencari nafkah utama di dalam keluarga.

http://sumut.bps.go.id

Tabel 10.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Sumatera Utara menurut Wilayah dan Jenis Kelamin, Februari 2008-2009

Wilayah/ Jenis Kelamin	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	
	2008	2009
(1)	*(2)*	*(3)*
1. Wilayah		
- Perkotaan	62,39	65,95
- Perdesaan	71,70	73,36
- Perkotaan + Perdesaan	67,44	69,98
2. Jenis Kelamin		
- Laki-laki	82,08	83,06
- Perempuan	53,30	57,26
- Laki-laki + Perempuan	67,44	69,98

Sumber : Sakernas Februari 2008 dan Februari 20

http://sumut.bps.go.id

Kemudian isu penting dalam pembangunan yang menjadi perhatian adalah pengangguran. Pada dasarnya pengangguran merupakan penduduk usia produktif yang tidak mendapatkan kesempatan bekerja dengan berbagai sebab. Konsep penganggur yang digunakan oleh BPS adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan yang sudah punya pekerjaan tetapi belum memulai bekerja dan pada waktu yang bersamaan mereka tidak bekerja (jobless). Penganggur dengan konsep/defenisi tersebut biasanya disebut pengangguran terbuka (open employment).

Berdasarkan data Sakernas Februari 2009, jumlah penganggur terbuka di Sumatera Utara pada Februari 2009 sebesar 521.643 orang, angka ini lebih rendah dibandingkan keadaan Februari 2008 atau mengalami penurunan sebesar 44.835 orang. Indikator yang digunakan untuk melihat tingkat pengangguran ini adalah Tingkat pengangguran terbuka (TPT), dimana TPT merupakan persentase jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2009 sebesar 8,25 persen, mengalami penurunan sebesar 1,30 persen dibandngkan TPT pada Februari 2008 yang besarnya 9,55 persen.

Jika dibandingkan antar wilayah perkotaan dan perdesaan, TPT di perkotaan yaitu sebesar 10,84 persen atau lebih tinggi dibandingkan TPT daerah perdesaan yang sebesar 6,30 persen pada Februari 2009. Hal yang menjadi alasan tidak berbeda dengan penjelasan untuk tingginya TPAK di perdesaan yaitu lapangan pekerjaan pertanian lebih terbuka menampung angkatan kerja ini walaupun hanya sebagai pekerja pertanian. Kemudian jika dianalisis menurut persfektif jender, TPT perempuan sebesar 10,38 persen atau lebih tinggi dibandingkan TPT laki-laki sebesar 6,74 persen. Kondisi ini lebih disebabkan perempuan lebih banyak mencari pekerjaan paruh waktu, sedangkan laki-laki umumnya sudah berstatus bekerja.

Jika dibandingkan dengan Februari 2008, TPT Sumatera Utara pada Februari 2009 mengalami penurunan, baik dilihat dari wilayah tempat tinggal dan jenis kelamin. TPT daerah perkotaan pada Februari 2009 sebesar 10,84 persen atau mengalami penurunan sebesar 2,29 persen dibandingkan Februari 2008 yaitu sebesar 13,13 persen. Demikian juga pada daerah perdesaan mengalami penurunan, pada Februari 2009 sebesar 6,30 persen atau menurun sebesar 0,61 persen dibandingkan Februari 2008 sebesar 6,91 persen.

http://sumut.bps.go.id

Tabel 10.3. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Utara menurut Wilayah dan Jenis Kelamin, Februari 2008-2009

Wilayah Tempat Tinggal/ Jenis Kelamin	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	
	2008	2009
(1)	*(2)*	*(3)*
1. Wilayah Tempat Tinggal		
a. Perkotaan	13,13	10,84
b. Perdesaan	6,91	6,30
c. Perkotaan + Perdesaan	9,55	8,25
2. Jenis Kelamin		
a. Laki-laki	7,49	6,74
b. Perempuan	12,61	10,38
c. Laki-laki + Perempuan	9,55	8,25

Sumber : Sakernas Februari 2008 dan Februari 2009

Selain TPT, ukuran pengganggguran lainnya yang dapat digunakan untuk melihat tingkat produktivitas pekerja adalah angka setengah pengangguran. Rendahnya produktivitas pekerja dapat dikarenakan faktor pekerja sendiri maupun faktor pekerjaan yang kurang memadai. Dalam kurun waktu satu tahun (Februari 2008-Februari 2009) di Sumatera Utara, jumlah setengah penganggur berada pada kisaran 1,48 juta orang hingga 1,65 juta orang. Mereka adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu).

Tabel 10.4. Jumlah Setengah Penganggur Provinsi Sumatera Utara menurut Jenis Penganggur, Februari 2008-2009

Kegiatan Utama	Satuan	Tahun	
		2008	2009
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
Jumlah Setengah Penganggur	**Orang**	**1.479.543**	**1.652.001**
a. Terpaksa	Orang	703.377	713.330
b. Sukarela	Orang	776.166	938.671

Sumber : Sakernas Februari 2008 dan Februari 2009

http://sumut.bps.go.id

Jumlah setengah penganggur pada Februari 2008 sebesar 1.479.543 orang dan meningkat menjadi 1.652.001 orang pada Februari 2009 bertambah. Dari jumlah tersebut sekitar 43,18 persen atau 713.330 orang merupakan setengah pengganggur terpaksa, yaitu mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal dan masih mencari pekerjaan atau masih mau menerima pekerjaan. Sedangkan jumlah setengah penganggur sukarela (mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal, tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain) pada Februari 2009 sebesar 938.671 orang. Dibandingkan dengan Februari 2008, jumlahnya menurun sebesar 162.505 orang.

Informasi lainnya yang dapat diperoleh dari Sakernas Februari 2009 adalah distribusi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan. Dari pembahasan sebelumnya diketahui bahwa proporsi terbesar penduduk bekerja di sektor pertanian. Berdasarkan Sakernas Februari 2007 dan Februari 2008 persentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian mencapai 47 persen. Hal yang sama juga dapat dilihat dari

hasil Sakernas Februari 2009, dimana sekitar 48 persen penduduk bekerja terserap di sektor pertanian. Sektor lainnya yang cukup signifikan dalam menyerap tenaga kerja adalah perdagangan dan jasa.

Tabel 10.5. Persentase Penduduk Sumatera Utara Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Februari 2008 dan 2009

Lapangan Pekerjaan Utama	Tahun	
	2008	2009
(1)	*(2)*	*(3)*
1. Pertanian	49,69	48,35
2. Pertambangan dan Penggalian	0,52	0,31
3. Industri	7,61	8,89
4. Listrik, Gas dan Air Minum	0,11	0,12
5. Bangunan/Konstruksi	4,03	3,93
6. Perdagangan	20,98	21,21
7. Angkutan/Transportasi	5,35	5,21
8. Keuangan	0,93	1,00
9. Jasa Kemasyarakatan	10,76	10,98
J u m l a h	**100,00**	**100,00**

Sumber : Sakernas Februari 2008 dan Februari 2009

http://sumut.bps.go.id

Dilihat menurut status pekerjaan, pada tahun 2009 didominasi bekerja sebagai buruh/karyawan baik pemerintah maupun swasta sebesar 27,31 persen, berusaha dibantu buruh tidak tetap sebesar 19,66 persen, bekerja sebagai pekerja keluarga sebesar 19,30 persen, berusaha sendiri tanpa dibantu orang lain sebesar 21,75 persen dan yang paling sedikit adalah berusaha dengan buruh tetap sebesar 2,77 persen.

Pola struktur status pekerjaan antara laki-laki dan perempuan pada tahun 2009 berbeda. Sebagian besar perempuan bekerja sebagai pekerja keluarga (38,29 persen), buruh/karyawan (34,65 persen), berusaha sendiri (17,92 persen) dan berusaha dibantu buruh tidak tetap 15,29 persen. Hal yang berbeda untuk penduduk laki-laki dimana sebagian besar sebagai buruh/karyawan (34,65 persen), berusaha dibantu buruh tidak tetap sebesar 23,58 persen dan berusaha sendiri sebesar 21,97 persen.

Tabel 10.6. Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas Provinsi Sumatera Utara menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, Februari 2009

Status Pekerjaan Utama	Laki-laki	Perempuan	Laki laki + Perempuan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1. Berusaha Sendiri	21,97	17,92	18,51
2. Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap	23,58	15,29	19,66
3. Berusaha Dengan Buruh Tetap	5,06	1,30	2,77
4. Buruh/Karyawan	34,65	19,44	27,31
5. Pekerja Bebas di Pertanian	3,77	3,83	5,51
6. Pekerja Bebas di Non Pertanian	3,13	3,93	4,50
7. Pekerjaan Keluarga	7,85	38,29	21,75
T o t a l	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber : Sakernas Februari 2009

http://sumut.bps.go.id